

**ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PENDUDUK, PENGELUARAN  
PEMERINTAH, DAN RASIO KETERGANTUNGAN TERHADAP INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



Oleh:

Nama : Siska Damayanti

Nomor Mahasiswa : 14313315

Program Studi : Ilmu Ekonomi

  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**YOGYAKARTA**  
**2018**

**Analisis Pengaruh Pengeluaran Penduduk, Pengeluaran Pemerintah, dan Rasio Ketergantungan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia**

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar

Sarjana jenjang Strata 1

Program Studi Ilmu Ekonomi



**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiarisme seperti yang dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Progrm Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai aturan yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Januari 2017

Penulis,



Siska Damayanti

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Analisis Pengaruh Pengeluaran Penduduk, Pengeluaran Pemerintah, dan Rasio  
Ketergantungan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia

Nama : Siska Damayanti

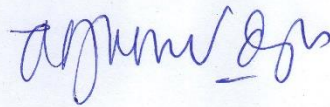
Nomor Mahasiswa : 14313315

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 25 Januari 2017

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Agus Widarjono, Drs., M.A., Ph.D.

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI**

SKRIPSI BERJUDUL

ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PENDUDUK, PENGELUARAN PEMERINTAH, DAN  
RASIO KETERGANTUNGAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI  
INDONESIA

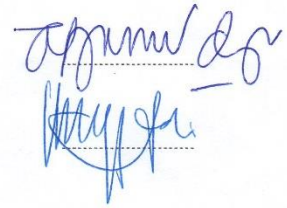
Disusun Oleh : **SISKA DAMAYANTI**  
Nomor Mahasiswa : **14313315**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Jum'at, tanggal: 9 Februari 2018

Penguji/Pembimbing Skripsi : Agus Widarjono, SE., MA., Ph.D

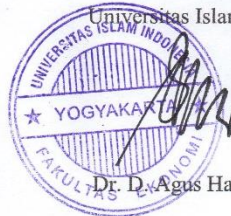
Penguji : Unggul Priyadi, Dr., M.si.



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

## HALAMAN MOTTO

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”*

*Qs. Ar-Ra'd – 13*

*“Sungguh, Kami benar-benar akan menguji kamu sekalian agar Kami mengetahui orang-orang yang berjuang dan orang-orang yang sabar di antara kamu sekalian”*

*Qs. Muhammad - 31*



*“Gott wurfelt nicht”*

*(Tuhan tidak bermain dadu)*

*Albert Einstein*

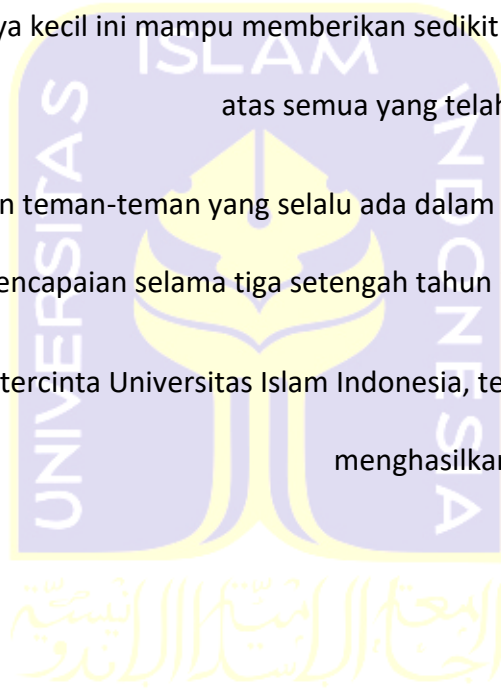
الجمعة الاستاذة الانيسة

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada kedua Orang Tuaku tercinta, Bapak dan Ibu yang selalu menyayangi, mendukung, dan mendoakanku di tiap lantunan doanya tanpe henti. Semogo karya kecil ini mampu memberikan sedikit balasan dan kebanggan atas semua yang telah kalian berikan padaku.

Semua keluarga dan teman-teman yang selalu ada dalam suka duka. Tanpa kalian semua pencapaian selama tiga setengah tahun ini tak akan pernah ada.

Almamaterku tercinta Universitas Islam Indonesia, tempat dimana ilmu yang menghasilkan karya kecil ini ditimba.





## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.,*

Alhamdulillahirabbil'alamin, puja dan puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat semua limpahan rahmad dan nikmatnya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul 'ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PENDUDUK, PENGELUARAN PEMERINTAH, SERTA RASIO KETERGANTUNGAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI INDONESIA' ini. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan besar umat Muslim, Nabi Besar Muhammad SAW karena tanpa beliau dunia ini tidak akan mampu menuju zaman berilmu seperti sekarang.

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan baik dalam segi pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang penulis miliki. Dalam proses penulisan, penulis banyak mendapatkan bantuan dari pihak-pihak lain sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Dengan segenap rasa terimakasih dan hormat, penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada pihak-pihak diantaranya:

1. Allah SWT atas segala nilamat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan, kesabara, serta kelancaran dalam tiap kehidupan Umat-Nya.



2. Kedua orang tua yang senantiasa mendukung tiap langkah penulis, Sistadji dan Haryati. Terimakasih semua waktu dan pengorabanan yang telah dilakukan yang penulis yakin tak akan pernah terhitung nilainya.
3. Semua keluarga penulis baik yang berada di Jogja maupun di Blitar. Simbah Kakung, Budhe Nanik, Budhe Tatik, Lek Tadi dan Lek Nur. Terimakasih atas semua perhatian yang telah kalian berikan kepadapenulis.
4. Bapak Drs. Agus Widarjono, M.A., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak arahan dan pengetahuan baru kepada penulis.
5. Bapak Akhsyim Affandi M.A. Ph.D. selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. Drs. Dwi Praptono Agus Harjito, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Nandang Sutrisna, S.H., M.Hum., LLM., Ph.D. selaku Rektor Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
8. Sahabat-sahabat penulis yang telah berjuang bersama sejak menginjakkan kaki di kampus tercinta, Wahid, Eko, Deny, Ramdan, Rosyida, Muni, dan Nida. Terimakasih telah menemani dan berjuang bersama penulis sampai di titik ini.
9. Semua teman Ilmu Ekonomi yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata,penulis mengharapka kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Semoga apa yang telah penulis curahkan dalam skripsi ini dapat

membantu kemajuan ilmu pengetahuan di masa mendatang dan bermanfaat bagi semua pihak.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.,*

Yogyakarta, 25 Januari 2018

Penulis



Siska Damayanti

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	i
<b>Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme</b> .....	ii
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	iii
<b>Halaman Pengesahan Ujian</b> .....	iv
<b>Halaman Motto</b> .....	v
<b>Halaman Persembahan</b> .....	vi
<b>Kata Pengantar</b> .....	vii
<b>Halaman Daftar Isi</b> .....	x
<b>Halaman Daftar Tabel</b> .....	xiv
<b>Halaman Daftar Gambar</b> .....	xv
<b>Halaman Daftar Lampiran</b> .....	xvi
<b>Abstrak</b> .....	xvii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	6
1.4. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI</b> .....	8
2.1 Kajian Pustaka .....	8
2.2 Landasan Teori .....	11
2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia .....	11

2.2.1.1 Perhitungan IPM Metode Lama .....	13
2.2.1.2 Perhitungan IPM Metode Baru.....	16
2.2.2 Pengeluaran per Kapita Penduduk.....	18
2.2.3 Pengeluaran Pemerintah .....	18
2.2.3.1 Model Pembangunan dan Pengeluaran Pembangunan.....	19
2.2.3.2 Hukum Wagner .....	20
2.2.3.3 Teori Peacock dan Wiseman .....	20
2.2.3.4 Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan.....	21
2.2.3.5 Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan.....	21
2.2.4 Rasio Ketergantungan Daerah.....	22
2.2.4.1 Fiscal Federalism.....	24
2.2.5 Kerangka Pemikiran .....	25
2.2.5.1 Hubungan Pengeluaran per Kapita Penduduk Sebulan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	25
2.2.5.2 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Bidang Kesehatan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	26
2.2.5.3 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Bidang Pendidikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	26
2.2.5.4 Hubungan Rasio Ketergantungan Daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia.....	27
2.2.6 Hipotesis Penelitian .....	28

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data.....	30
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	31
3.2.1 Variabel Independen.....	31
3.2.1.1 Variabel Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk (X1) .	31

3.2.1.2 Variabel Pengeluaran Pemerintah Provinsi Bidang Kesehatan (X2).....	31
3.2.1.3 Variabel Pengeluaran Pemerintah Provinsi Bidang Pendidikan (X3).....	31
3.2.1.4 Variabel Rasio Ketergantungan Daerah .....	32
3.2.2 Variabel Dependen .....	32
3.3 Metode Analisis Data.....	32
3.3.1 Model Common Effect .....	34
3.3.2 Model Fixed Effect Least Square Dummy Variable (LSDV) .....	35
3.3.3 Model Random Effect .....	36
3.4 Pemilihan Model.....	38
3.4.1 Uji Chow .....	38
3.4.2 Uji Hausman.....	39
3.5 Pengujian Statistik .....	40
3.5.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	41
3.5.2 Uji Kelayakan Model (Uji F) .....	41
3.5.3 Uji Signifikansi Variabel Independen (Uji t) .....	43
<b>BAB IV HASIL DAN ANALISIS</b> .....	<b>46</b>
4.1 Deskripsi Data Penelitian.....	46
4.2 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	47
4.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	47
4.2.2 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk.....	47
4.2.3 Pengeluaran Pemerintah Provinsi Bidang Kesehatan.....	48
4.2.4 Pengeluaran Pemerintah Provinsi Bidang Pendidikan .....	49
4.2.5 Rasio Ketergantungan Daerah.....	49
4.3 Hasil Estimasi Regresi Data Penel.....	50
4.3.1 Hasil Common Effect Models .....	50

4.3.2 Hasil Fixed Effect Models.....	50
4.3.3 Hasil Random Effect Models .....	51
4.4 Pemilihan Model Regresi.....	51
4.4.1 Chow Test.....	51
4.4.2 Hausman Test .....	52
4.5 Evaluasi Hasil Regresi Fixed Effect Models .....	53
4.5.1 Pengujian Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	55
4.5.2 Uji Kelayakan Model (Uji F) .....	55
4.5.3 Uji Signifikansi Variabel Independen (Uji t) .....	56
4.5.3.1 Variabel Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk (X1).....	56
4.5.3.2 Variabel Pengeluaran Pemerintah Provinsi Bidang Kesehatan (X2).....	56
4.5.3.3 Variabel Pengeluaran Pemerintah Provinsi Bidang Pendidikan (X3).....	57
4.5.3.4 Variabel Derajat Ketergantungan Daerah (X4) .....	57
4.6 Interpretasi Hasil Analisis.....	58
4.6.1 Persamaan Regresi Slope Sama.....	58
4.6.2 Persamaan Koefisien dan Intersep Pembeda.....	60
<b>BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI</b> .....	63
5.1 Simpulan .....	63
5.2 Implikasi.....	64
<b>Daftar Pustaka</b> .....	66

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b>	IPM Provinsi di Indonesia Tahun 1999-2013 .....	2
<b>Tabel 2.1</b>	Pembagian Tingkat Indeks Pembangunan Manusia.....	12
<b>Tabel 2.2</b>	Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah .....	24
<b>Tabel 4.1</b>	Hasil Uji Chow (Chow Test).....	52
<b>Tabel 4.2</b>	Hasil Uji Hausman (Hausman Test) .....	53
<b>Tabel 4.3</b>	Hasil Estimasi Fixed Effect Models.....	54
<b>Tabel 4.4</b>	Hasil Statistik t-Hitung .....	56
<b>Tabel 4.5</b>	Nilai Intersep dan Sampel Provinsi.....	60





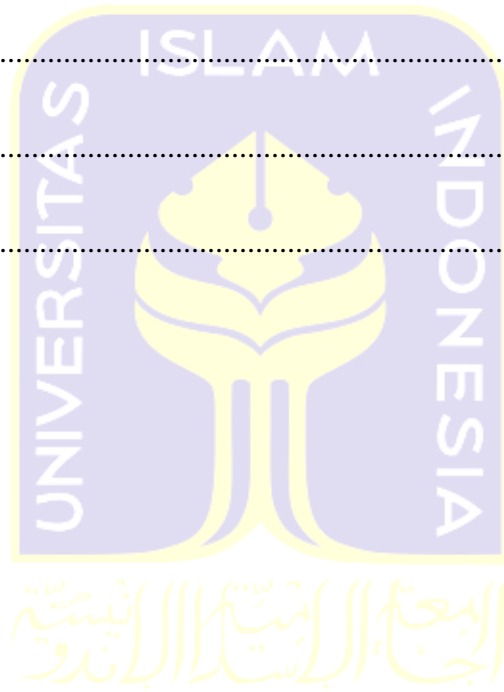
## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b>	Kerangka Pemikiran .....	28
-------------------	--------------------------	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I .....	68
Lampiran II.....	70
Lampiran III .....	72
Lampiran IV .....	74
Lampiran V .....	76
Lampiran VII.....	78
Lampiran VII.....	79

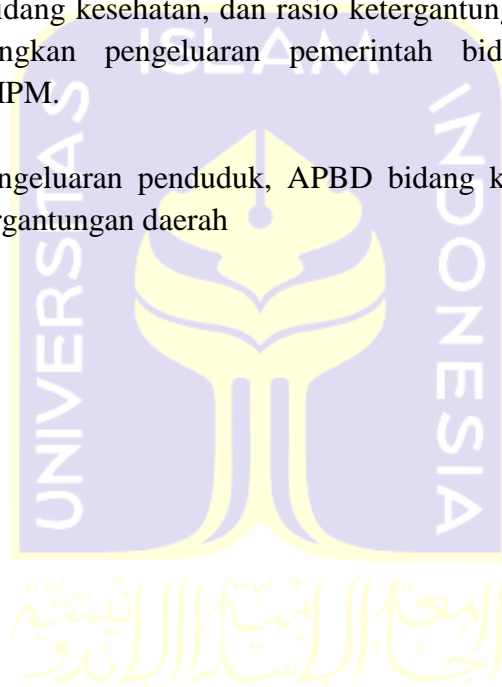


## ABSTRAK

### **Analisis Pengaruh Pengeluaran Penduduk, Pengeluaran Pemerintah, dan Rasio Ketergantungan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia.**

Penelitian ini mengidentifikasi pengaruh pengeluaran rata-rata penduduk per kapita sebulan, pengeluaran pemerintah provinsi bidang kesehatan, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, dan rasio ketergantungan daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia dari tahun 2008-2013 dengan observasi di 33 Provinsi di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Dari penelitian ini diketahui bahwa pengeluaran rata-rata penduduk per kapita sebulan, pengeluaran pemerintah provinsi bidang kesehatan, dan rasio ketergantungan daerah berpengaruh terhadap IPM, sedangkan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan tidak berpengaruh terhadap IPM.

Kata Kunci: IPM, pengeluaran penduduk, APBD bidang kesehatan, APBD bidang pendidikan, rasio ketergantungan daerah



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sampai pada tahun 1960-an, konsep yang dijadikan tolok ukur pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 2016). Keberhasilan pembangunan nasional hanya diukur berdasarkan pertambahan jumlah output yang dapat dihasilkan sebuah negara. Namun ternyata, hal ini tidak terjadi pada negara-negara berkembang. Maka dari itu, setelah tahun 1960-an konsep perkembangan ekonomi ini tidak hanya dilihat dari pertambahan jumlah output yang dapat dihasilkan oleh sebuah negara (GDP), tapi juga diperluas dengan melihat aspek peningkatan kualitas hidup para warga negara dari waktu ke waktu. Pada masa-masa selanjutnya, pengukuran perkembangan sebuah negara menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau juga dikenal dengan *Human Development Index* (HDI).

Adalah PBB melalui salah satu organisasinya, UNDP, pada tahun 1990 untuk pertama kalinya menerbitkan laporan tahunan yang berisi pemeringkatan negara-negara di dunia untuk mengukur capaian suatu negara dalam membangun sumberdayanya. HDI (*Human Development Index*) atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu standar yang telah digunakan oleh semua negara di dunia. Indeks ini diukur dengan menggunakan 4 aspek, yaitu angka harapan hidup; angka melek huruf; angka partisipasi kasar; dan indeks paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*).

Berdasarkan data dari BPS, dari tahun 2010 sampai tahun 2016, terlihat bahwa rata-rata nilai IPM Indonesia terus mengalami kenaikan. Selama 7 tahun terakhir, rata-rata IPM Indonesia naik sebesar 1,26% per tahunnya. Berdasarkan tingkatan IPM yang telah dikeluarkan PBB, Indonesia merupakan negara dengan tingkat IPM menengah (*Medium Human Development Country*). Berikut adalah tabel IPM tiap-tiap Propinsi di Indonesia dari tahun 1999 sampai 2016.

**Tabel 1.1**  
**IPM Propinsi di Indonesia Tahun 1999-2013**

Tahun	IPM	Tahun	IPM
1999	64.3	2008	71.17
2002	65.8	2009	71.76
2004	68.7	2010	72.27
2005	69.57	2011	72.77
2006	70.1	2012	73.29
2007	70.59	2013	73.81

*Sumber: BPS*

Dapat diamati bahwa dari tahun ke tahun Indeks Pembangunan Manusia Indonesia terus mengalami kenaikan. Kenaikan nilai Indeks Pembangunan Manusia ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Karena pembentuk IPM terdiri dari dimensi pendapatan, pendidikan, dan kesehatan, tiga aspek ini merupakan hal yang paling mempengaruhi IPM. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harus mampu menaikkan tiga dimensi ini.

Tingkat pendapatan merupakan salah satu tolok ukur yang digunakan dalam menilai tingkat kesejahteraan. Pendapatan yang tinggi memungkinkan seseorang untuk mengakses lebih banyak kebutuhan-kebutuhan dasar (*basic needs*). Dengan demikian,

tingkat pendapatan yang tinggi secara otomatis akan meningkatkan total pengeluaran rumah tangga. Maka tak heran jika ditemukan tingkat konsumsi di negara-negara maju tergolong tinggi karena efek dari pendapatan yang tinggi.

Di sisi lain, peran pemerintah dalam pembangunan sangatlah penting. Salah satu peran utama pemerintah adalah menyediakan barang publik yang tidak akan mampu disediakan oleh pihak swasta. Pada penerapan ekonomi modern, pemerintah akan turun tangan dalam perekonomian bukan hanya sebagai pihak yang menyediakan barang publik, namun juga sebagai pihak yang mendorong pembangunan dari sisi non-ekonomi. Hal seperti ini dapat dilihat dari keterlibatan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusianya agar mampu berperan dalam pembangunan ekonomi, misalkan saja dalam hal menyediakan dan menjamin pendidikan serta kesehatan rakyatnya. Cara menjamin ini dapat berupa dalam berbagai bentuk. Namun kembali lagi, kemampuan menjamin pendidikan dan kesehatan pemerintah suatu negara bergantung pada kondisi keuangan negara yang bersangkutan. Semakin besar kemampuan keuangan negara, maka dapat dikatakan bahwa kemampuan menjamin kesejahteraan rakyatnya dalam bidang kesehatan dan pendidikan semakin tinggi.

Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan dilakukan utamanya untuk menaikkan derajat/kualitas kesehatan dan pendidikan. Pada akhirnya, bila kualitas kesehatan dan pendidikan dapat terus ditingkatkan secara terus menerus dan berkelanjutan, dalam jangka panjang akan mempengaruhi produktivitas sumber daya manusia menjadi lebih tinggi (Rokhedi, 2015). Peningkatan produktivitas inilah yang

akan menunjang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dari logika yang telah dibangun ini dapat diambil dua kesimpulan, yaitu kenaikan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Inilah tujuan akhir yang diinginkan dari investasi bidang kesehatan dan pendidikan yang dilakukan oleh negara.

Efisiensi dalam menjalankan kegiatan pemerintahan juga akan sangat menentukan peningkatan kesejahteraan rakyat (Khusnaini, 2006). Sejak diberlakukannya otonomi daerah mulai tahun 2004, daerah otonom memiliki hak dan wewenang baik dalam bidang birokrasi dan keuangan dalam menjalankan pemerintahannya sendiri. Daerah otonom dibebaskan untuk mengelola potensi daerahnya untuk membiayai kegiatan pembangunannya sendiri. Namun pemerintah pusat masih memberikan dana transfer pusat atau sering disebut dengan dana perimbangan yang diberikan berdasarkan perhitungan jumlah penduduk, PAD, luas wilayah, dll.. Besar kecilnya dana transfer terhadap total pendapatan daerah ini yang menentukan apakah daerah sudah mampu membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri atau tidak.

Berdasarkan beberapa alasan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memutuskan untuk meneliti apakah ada hubungan antara pengeluaran per kapita sebulan penduduk, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, dan rasio ketergantungan daerah terhadap IPM di Indonesia.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, rumusan masalah dari penelitian ini dijabarkan sebagai berikut.



1. Bagaimanakah pengaruh pengeluaran per kapita sebulan penduduk terhadap IPM di Indonesia pada tahun 2008-2013?
2. Bagaimanakah pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap IPM di Indonesia pada tahun 2008-2013?
3. Bagaimanakah pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap IPM di Indonesia pada tahun 2008-2013?
4. Bagaimanakah pengaruh rasio ketergantungan daerah terhadap IPM di Indonesia pada tahun 2008-2013?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran per kapita sebulan penduduk terhadap IPM di Indonesia tahun 2008-2013.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap IPM di Indonesia tahun 2008-2013.
3. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap IPM di Indonesia tahun 2008-2013.
4. Untuk menganalisis pengaruh rasio ketergantungan daerah terhadap IPM di Indonesia tahun 2008-2013.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi penulis serta pihak-pihak lain yang berkepentingan, seperti yang dijelaskan di bawah ini.

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga merupakan salah satu media untuk mengimplementasikan dan menganalisis teori-teori yang telah penulis pelajari selama bangku kuliah ke dalam permasalahan ekonomi secara riil.
2. Bagi dunia ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan perbandingan bagi pihak-pihak yang melakukan studi serupa.
3. Bagi instansi terkait, baik swasta maupun pemerintah penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan masukan dalam rangka penyusunan dan pengambilan kebijakan di bidang yang bersangkutan.
4. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi tentang IPM dan faktor yang mempengaruhinya, baik masyarakat secara umum maupun bagi masyarakat yang memiliki kepentingan yang berkaitan dengan topik yang serupa pada penelitian ini.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika dari penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab yang dijelaskan pada bagian di bawah ini.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bagian ini menjelaskan tentang uraian dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

Pada bagian ini akan diuraikan tentang beberapa penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, serta pemaparan beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini. Hipotesis peneliian juga akan disajikan dalam bagian ini.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan penjelasan mengenai objek penelitian baik jenis maupun metode pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian, juga berbagai meode dan pendekatan yang akan digunakan dalam menganalisis hasil dari pengolahan data.

**BAB IV : HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini akan disajikan hasil pengolahan data serta pembahasan dan interpretasi dari pengolahan data.

**BAB V : SIMPULAN DAN IMPLIKASI**

Bagian ini akan membahas simpulan dari hasil analisis daa pada bab sebelumnya guna menjawab hipoesis yang telah disusun di awal, serta mejelaskan implikasi yang terjadi berdasarkan pada hasil pengolahan data.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Kajian Pustaka

Manik (2013) mengkaji tentang Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia dari tahun 2008-2011. Pada penelitian ini, Manik menggabungkan antara ukuran keuangan daerah (PAD, DAU, DAK), demografi (jumlah penduduk), dan ukuran makro ekonomi (inflasi dan kemiskinan) sebagai variabel independen dan pengaruhnya terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 32 Provinsi di Indonesia. Model analisis yang digunakan adalah korelasi antar variabel independen dan dependen, juga analisis tentang pengaruh langsung dan tidak langsung variabel dependen (Indeks Pembangunan Manusia) dan independen terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari penelitian ini didapati bahwa PAD dan kemiskinan memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan DAU, DAK, dan inflasi tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sendiri memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Setiawan dan Hakim (2013) juga mengkaji tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia dengan data *time series* dan menggunakan metode *Error Correction Model* (ECM) dari tahun 1990-2010, juga memasukkan variabel *dummy* dalam analisisnya. Variabel *dummy* yang digunakan adalah *dummy* desentralisasi dan krisis tahun 1998 dan 2008. Variabel independen yang dimasukkan adalah Produk Domestik Bruto (PDB) dan pajak penghasilan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa PDB

dan pajak penghasilan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) baik saat krisis 1998 maupun krisis 2008. Variabel krisis tahun 2008 berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sedangkan di lain sisi variabel krisis 1998 dan desentralisasi tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Secara lebih spesifik lagi, beberapa penelitian tentang Indeks Pembangunan Manusia terfokus pada daerah tertentu yang lebih kecil (regional). Dalam penelitiannya, Ndakularak dkk. (2014) memilih ruang lingkup yang lebih sempit yaitu Provinsi Bali. Penelitian ini berfokus pada pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi/makan, pendidikan, dan kesehatan dalam pengaruhnya pada Indeks Pembangunan Manusia 9 Kota/Kabupaten di Bali. Kesimpulan dari penelitian Provinsi Bali ini adalah pengeluaran rumah tangga untuk makanan dan pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan tidak berpengaruh.

Selain perbedaan dari skala daerah yang diteliti, beberapa peneliti lebih menekankan pada variabel yang digunakan. Wardhana (2016) yang lebih berfokus pada pengaruh kondisi makro ekonomi (tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi) dan pengaruhnya terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur. Penelitian ini juga memasukkan dua variabel moderasi yaitu APBD sektor pendidikan dan APBD sektor kesehatan. Hasilnya adalah ternyata kesemua variabel independen dan variabel moderasi yang digunakan dalam model penelitian tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur.

Bukan hanya terfokus pada masalah makro ekonomi yang sering dijadikan tolok ukur pembangunan, Harahap (2011) mencoba mengaitkan Indeks Pembangunan Manusia dengan keuangan sektor publik. Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan semuanya adalah data keuangan daerah di Provinsi Sumatera Utara. Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berperan sebagai variabel independen dalam penelitian ini. Ironisnya, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini dimungkinkan terjadi dikarenakan alokasi dari dana transfer pusat ini digunakan untuk membiayai kegiatan investasi dalam hal infrastruktur. Hampir sama dengan Harahap, Anggraini dan Sutaryo (2015) juga meneliti apakah rasio-rasio keuangan sektor publik berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Variabel independen yang digunakan adalah rasio desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan daerah, rasio efektivitas, dan rasio efektivitas pajak daerah. Dari semua variabel yang diteliti, hanya rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio desentralisasi yang berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.

Dari beberapa penelitian terdahulu, penulis menyadari bahwa tidak semua jenis variabel independen yang digunakan, baik dari sisi kondisi makro ekonomi maupun sisi keuangan daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Lingkup penelitian yang terlalu sempit atau bahkan jangka waktu yang diambil dalam penelitian mungkin menjadi alasan mengapa hasil dari tiap penelitian berbeda. Maka dari itu, dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk menggabungkan variabel makroekonomi

dan variabel keuangan sektor publik sebagai variabel independen untuk menganalisis perilakunya terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Lingkup wilayah yang diteliti juga dilebarkan bukan hanya mencakup satu wilayah regional/provinsi, tapi semua provinsi di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan hasil dari penelitian ini mampu menjelaskan apakah variabel yang independen yang dipilih berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia 33 Provinsi di Indonesia. Sedangkan variabel independennya adalah pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang mewakili kondisi makroekonomi tiap Provinsi, sedangkan variabel yang mewakili pada bidang keuangan sektor publik adalah pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, dan rasio ketergantungan daerah. Keempat variabel yang dipilih ini dirasa memiliki pengaruh yang erat terhadap Indeks Pembangunan Manusia karena menyinggung komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia, yaitu dimensi pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia**

Perubahan paradigma pembangunan yang bukan hanya mencakup dimensi ekonomi saja tapi juga mencakup dimensi sosial, pada tahun 1990 UNDP mulai menerbitkan laporan tahunan yang berisi pemeringkatan capaian negara-negara di dunia dalam membangun aspek sosio-ekonominya. Indeks Pembangunan Manusia ini memiliki nilai antara 0 – 100, dan memiliki 3 tujuan produk akhir dari pembangunan



itu sendiri, yaitu masa hidup yang panjang, tingkat pengetahuan, dan standar hidup. Pada masa selanjutnya, metode pengukuran IPM ini berubah karena indikator lama dirasa sudah tidak tepat digunakan dalam menghitung IPM. UNDP sendiri membagi negara-negara di dunia menjadi 4 kelompok berdasarkan nilai IPM-nya.

**Tabel 2.1**

**Pembagian Tingkat Indeks Pembangunan Manusia**

No	Skor Indeks Pembangunan Manusia	Keterangan
1	0,0 – 49,9	Pembangunan Manusia Rendah
2	50 – 79,9	Pembangunan Manusia Sedang
3	80 – 90	Pembangunan Manusia Tinggi
4	90 – 100	Pembangunan Manusia Sangat Tinggi

*Sumber: UNDP*

Menurut Todaro (2012), IPM merupakan sebuah indeks yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan sosio-ekonomi suatu negara yang dibentuk dari capaian bidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil yang disesuaikan. Komponen-komponen pembentuk IPM ini akan memberikan gambaran bahwa negara dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah bukan berarti pembangunan manusianya juga rendah. Pembangunan tidak hanya dilihat dari pendapatan per kapita yang tinggi, namun juga mementingkan aspek pembangunan manusia yang lebih luas.

BPS sendiri mendefinisikan IPM sebagai sebuah ukuran yang digunakan untuk memberikan gambaran kemampuan penduduk dalam mengakses hasil pembangunan,

yang dirangkum dalam aspek pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Sebelum tahun 2010, perhitungan IPM masih menggunakan indikator PDB per kapita untuk mengukur aspek pendapatan, angka melek huruf dan partisipasi sekolah untuk mengukur aspek pendidikan, dan angka harapan hidup untuk mengukur aspek kesehatan. Namun pada tahun 2010, UNDP mengubah metode perhitungan dan indikator yang digunakan dalam IPM sehingga pada tahun 2010 BPS juga mengubah metode perhitungan IPM di Indonesia.

#### **2.2.1.1 Perhitungan IPM Metode Lama**

Perhitungan IPM metode lama merupakan perhitungan yang digunakan pada saat awal kemunculan konsep Indeks Pembangunan Manusia. Dalam bukunya, Todaro menyebut perhitungan ini sebagai Indeks Pembangunan Manusia Tradisional. Perhitungan IPM dengan menggunakan metode lama dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator berikut.

- Indikator pendapatan dihitung dengan GDP per kapita.
- Indikator kesehatan dilihat dari besarnya indeks harapan hidup.
- Indikator pendidikan dilihat dari jumlah angka melek huruf dan partisipasi sekolah bruto.

Indeks pendapatan merupakan perhitungan dari pendapatan yang disesuaikan. Asumsi dari perhitungan indeks pendapatan adalah bahwa pendapatan riil per kapita penduduk tidak mungkin kurang dari \$100 PPP. Sedangkan pendapatan per kapita tertinggi ditetapkan sebesar \$40.000 PPP. Dengan demikian, indeks pendaptan

diperoleh dengan cara membagi selisih pendapatan riil per kapita dengan pendapatan terendah dengan selisih pendapatan tertinggi dan terendah. Secara matematis, indeks pendapatan dijelaskan sebagai berikut.

$$P = \frac{[\log(p_1) - \log 100]}{[\log 40000 - \log 100]}$$

Keterangan

P : indeks pendapatan

$p_1$  : pendapatan riil perkapita suatu daerah

Dalam menentukan indeks harapan hidup, UNDP menentukan patokan harapan hidup paling rendah yang dapat dicapai adalah 25 tahun. Sedangkan harapan hidup paling tinggi yang dapat dicapai adalah 85 tahun. Cara perhitungannya hampir sama dengan indeks pendapatan, yaitu dengan membagi selisih antara lama harapan hidup suatu wilayah dan harapan hidup terendah dengan selisih antara harapan hidup tertinggi dan terendah. Secara matematis digambarkan sebagai berikut.

$$IHH = \frac{HH - 25}{85 - 25}$$

Keterangan

IHH : indeks harapan hidup

HH : lama harapan hidup suatu wilayah/negara

Indeks pendidikan dalam perhitungan IPM metode lama terdiri dari 2 komponen indeks, yaitu indeks melek aksara dan indeks partisipasi sekolah bruto. Indeks melek

aksara ditetapkan antara 0-1 dan tidak mungkin melebihi 1. Indeks melek aksara dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini.

$$IMA = \frac{MA - 0}{100 - 0}$$

Keterangan

IMA : indeks melek aksara

MA : persentase penduduk yang dapat membaca

Angka 100 dalam rumus indeks melek aksara menunjukkan bahwa semua penduduk usia dewasa mampu membaca dan angka 0 menandakan bahwa semua penduduk usia dewasa tidak dapat membaca. Indeks partisipasi sekolah dijelaskan sebagai persentase penduduk yang berpartisipasi dalam kegiatan sekolah mulai dari sekolah dasar (SD), menengah (SMP), dan tinggi (SMA). Indeks partisipasi sekolah dapat dicari dengan rumus berikut.

$$IPSB = \frac{S - 0}{100 - 0}$$

Keterangan

IPSB : indeks partisipasi sekolah bruto

MA : persentase penduduk yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan sekolah tingkat dasar, menengah, dan tinggi

Angka 100 dalam rumus indeks partisipasi sekolah bruto menunjukkan bahwa semua penduduk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan dan angka 0 menandakan bahwa semua penduduk tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan. Setelah mengetahui nilai dari indeks melek aksara dan indeks partisipasi

sekolah bruto, indeks pendidikan dapat dihitung. Caranya adalah dengan menambahkan antara indeks melek aksara dengan bobot  $\frac{2}{3}$  dan indeks partisipasi sekolah bruto dengan bobot  $\frac{1}{3}$

$$IP = \frac{2}{3}IMA + \frac{1}{3}IPSB$$

Keterangan

IP : indeks pendidikan

Selanjutnya, Indeks Pembangunan Manusia dapat dihitung dengan cara menambahkan ketiga indeks yang telah dihitung sebelumnya (indeks pendapatan, indeks melek aksara, dan indeks partisipasi sekolah bruto). Masing masing dari ketiga indeks tersebut memiliki bobot yang sama yaitu sebesar  $\frac{1}{3}$ . Secara matematis, Indeks Pembangunan Manusia metode lama dihitung dengan rumus berikut.

$$IPM = \frac{1}{3}P + \frac{1}{3}IHH + \frac{1}{3}IP$$

### 2.2.1.2 Perhitungan IPM Metode Baru

Sejak diterbitkannya laporan tahunan *Human Development Report* (HDR), metode perhitungan Indeks Pembangunan Manusia telah mengalami perubahan. Penggunaan metode baru pada perhitungan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia baru dilakukan pada tahun 2010. Metode baru ini masih mengandung tiga dimensi dasar pembentuk Indeks Pembangunan Manusia, hanya saja aspek yang diamati berubah. Angka Melek Huruf (AMH) dari segi pendidikan diganti dengan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan

Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia dengan menggunakan metode baru memiliki perhitungan sebagai berikut.

a. Dimensi Kesehatan

Dimensi kesehatan menggunakan ukuran lamanya Angka Harapan Hidup (AHH), dengan, rumus sebagai berikut.

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

b. Dimensi Pendidikan

Dimensi pendidikan dihitung dari dua komponen, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah.

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

3. Dimensi Pengeluaran

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

Sehingga, perhitungan akhir Indeks Pembangunan Manusia merupakan rata-rata geometrik dari penjumlahan indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran dan memiliki rumus persamaan sebagai berikut.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

### 2.2.2 Pengeluaran per Kapita Penduduk

Keynes mengemukakan teori konsumsi yang fenomenal dan dianggap sebagai sebuah keberhasilan empiris di zamannya. Teori yang dikemukakan oleh Keynes ini berpendapat bahwa bila seseorang mendapatkan tambahan pendapatan, maka secara alamiah, dia akan menambah konsumsi namun besarnya tambahan konsumsi ini tidak akan sebesar tambahan pendapatannya (Mankiw, 2007). Kenaikan pendapatan ini dicerminkan dalam besarnya *Marginal Propensity to Consume* (MPC), dimana besarnya MPC ini antara 0 sampai 1. MPC sering disebut dengan kecenderungan berkonsumsi masyarakat, yang merupakan persentase dari pendapatan yang digunakan untuk berkonsumsi. Hal ini berarti bahwa jika terjadi kenaikan pendapatan, maka akan terjadi kecenderungan kenaikan jumlah konsumsi.

### 2.2.3 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan semua pengeluaran yang digunakan untuk membiayai semua kegiatan negara/daerah dalam rangka menjalankan fungsinya (Idris, 2016). Pengeluaran pemerintah secara garis besar dapat dibagi menjadi:

- a. Pengeluaran investasi, dimana pengeluaran ini digunakan dengan tujuan menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa depan.
- b. Pengeluaran langsung, dimana jenis pengeluaran ini langsung dialokasikan guna peningkatan kesejahteraan rakyat secara langsung.
- c. Pengeluaran yang merupakan penghematan pengeluaran di masa mendatang.
- d. Pengeluaran untuk peningkatan jumlah lapangan kerja dan peningkatan daya beli masyarakat.



Para ahli juga mengemukakan beberapa teori tentang pengeluaran pemerintah. Berikut akan dijelaskan beberapa teori tentang pengeluaran pemerintah dari beberapa ekonom.

### **2.2.3.1 Model Pembangunan dan Pengeluaran Pembangunan**

Teori ini diperkenalkan oleh Rostow dan Musgrave, dimana mereka menghubungkan antara perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan (Idris, 2016). Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi oleh pemerintah besar. Hal ini terjadi karena pemerintah dituntut untuk menyediakan infrastruktur guna mendukung perkembangan ekonomi. Bukan hanya penyediaan infrastruktur, pemerintah juga harus menyediakan sarana dan prasarana guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam perekonomian.

Tahap selanjutnya adalah tahap menengah, dimana investasi swasta mulai berkembang pesat. Namun demikian, investasi pemerintah masih tetap dibutuhkan dikarenakan pada tahap ini mulai terjadi masalah-masalah dalam perekonomian, misalkan saja kegagalan pasar. Masalah-masalah seperti inilah yang tidak dapat ditangani swasta dan pemerintah mau tidak mau harus turun tangan dalam perekonomian.

Tahap terakhir adalah tahap ekonomi lanjut. Pada tahap ini pengeluaran pemerintah mulai bergeser dari penyedia sarana dan prasarana menjadi penyedia layanan kegiatan sosial. Kegiatan sosial ini biasanya merupakan program-program tunjangan untuk masyarakat, seperti tunjangan hari tua, tunjangan kesehatan, dll..

### 2.2.3.2 Hukum Wagner

Inti dari hukum Wagner adalah peran pemerintah yang terus meningkat. Peningkatan peran pemerintah ini juga menggambarkan bahwa pengeluaran pemerintah dari waktu ke waktu akan terus meningkat. Peningkatan pengeluaran pemerintah ini disebabkan adanya peningkatan PDB dari waktu ke waktu. Hukum Wagner juga dikenal dengan *The Law of Expanding State Expenditure*. Dasar dari hukum ini adalah studi pengamatan empiris dari negara-negara maju (Idris, 2016).

### 2.2.3.3 Teori Peacock dan Wiseman

Teori ini membahas tentang hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pemungutan pajak. Pemerintah memiliki kecenderungan peningkatan pengeluaran, sedangkan di sisi lain pengeluaran pemerintah dibiayai dari pemungutan pajak. Pada tingkat ini, masyarakat akan memahami pungutan pajak yang dibebankan. Meskipun masyarakat masih mau membayar pajak yang dibebankan, pada akhirnya pada tingkat pajak tertentu masyarakat akan menolak untuk membayar pajak karena pajak dirasa terlalu tinggi. Inilah yang dinamakan dengan tingkat toleransi pajak.

Dengan demikian, dalam keadaan normal, kenaikan PDB akan menaikkan penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah. Namun keadaan normal ini dapat terganggu karena suatu hal, misalnya perang dan bencana alam. Akibat dari dua kegiatan ini sering kali bukan hanya dibiayai oleh pajak, tapi juga dibiayai dengan utang dari pihak lain. Dengan demikian, meskipun perang telah berakhir tingkat pajak masih akan tinggi dikarenakan negara masih berkewajiban mengembalikan utang yang

telah diterima. Namun dalam jangka waktu yang panjang, tingkat pajak ini akan menurun sesuai dengan berakhirnya masa pinjaman

#### **2.2.3.4 Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan**

Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan merupakan pengeluaran yang dialokasikan khusus untuk bidang kesehatan. Pemerintah melaksanakan tanggungjawabnya dalam bidang kesehatan dibiayai menggunakan anggaran ini. Dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 dijelaskan lebih lanjut bahwa tanggungjawab pemerintah di bidang kesehatan meliputi penyediaan layanan publik. Layanan publik di bidang kesehatan ini berhak diperoleh oleh setiap rakyat Indonesia secara adil guna memperoleh tingkat kesejahteraan yang setinggi-tingginya.

Biasanya negara berkembang memiliki tingkat kesehatan yang rendah. Hal ini terjadi karena masyarakatnya tidak mampu membeli fasilitas kesehatan yang notabene disediakan oleh pihak swasta. Dalam kasus ini, fasilitas kesehatan menjadi salah satu barang publik, dimana pihak swasta tidak akan mau menyediakannya. Maka dari itu, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam lingkungan negara berkembang untuk turut menaikkan derajat kesehatan rakyatnya.

#### **2.2.3.5 Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan**

Dalam UU No. 27 Tahun 2014 pengeluaran pemerintah bidang pendidikan atau disebut dengan anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran fungsi pendidikan untuk digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggungjawab pemerintah. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 4 dijelaskan bahwa

anggaran pendidikan ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN dan atau APBD.

Menurut sejarah, semenjak berdirinya NKRI pemerintah baru menerapkan amanah Undang Undang Dasar 1945 untuk menetapkan anggaran pendidikan sebesar 20% dari total APBN baru dimulai pada tahun 2010. Dengan melihat besarnya persentase ini, dapat disimpulkan bahwa memang pendidikan sangatlah penting dalam pembangunan suatu negara. Meskipun anggaran pendidikan dalam APBN telah ditetapkan sebesar 20% di tahun 2010, pemerintah daerah masih belum dapat merealisasikan amanah ini dikarenakan berbagai kendala.

#### 2.2.4 Rasio Ketergantungan Daerah

Rasio ketergantungan daerah merupakan suatu ukuran untuk menilai tingkat ketergantungan keuangan suatu daerah terhadap pemerintah pusat. Rasio ini diperoleh dengan membagi jumlah dana transfer pusat/dana perimbangan dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi nilai rasio ketergantungan daerah, maka semakin tergantung pula keuangan suatu daerah terhadap kucuran dana dari pemerintah pusat, *vice versa*. Secara matematis, rasio ketergantungan adalah sebagai berikut (Sistianan dan Makmur, 2104).

$$RD_f = \frac{DAU + DAK + DBH}{TPD} \times 100\%$$

Keterangan

$RD_f$  = rasio desentralisasi fiscal

DAU = dana alokasi umum

DAK = dana alokasi khusus

DBH = dana bagi hasil

TPD = total penerimaan APBD

Dalam UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dana transfer pemerintah pusat atau dana transfer ke daerah merupakan bagian dari APBN yang diberikan kepada masing-masing pemerintah daerah dengan tujuan untuk pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dana transfer ke daerah ini berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana perimbangan sendiri terbagi menjadi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Menurut Bisma dan Susanto (2010), tingkat ketergantungan daerah dibagi dalam beberapa tingkatan. Ada 6 tingkatan ketergantungan daerah mulai dari yang paling baik dengan tingkat ketergantungan yang rendah samapai yang paling buruk dengan tingkat ketergantungan daerah sangat tinggi (diatas 50%). Berikut disajikan tingkat ketergantungan daerah dalam tabel yang lebih sederhana.

Tabel 2.2

## Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

Persentase (%)	Tingkat Ketergantungan
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

Dalam beberapa kasus, dana transfer pemerintah pusat memiliki jumlah yang lebih besar dikarenakan adanya tambahan dana transfer khusus dimana hanya daerah tertentu yang mendapatkannya. Misalkan saja Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang hanya diberikan pada Provinsi DIY. Pemberian dana keistimewaan ini dijelaskan dengan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, masih ada satu jenis dana transfer yang diberikan hanya kepada daerah tertentu yaitu dana otonomi khusus. Ada 2 provinsi yang diberikan dana otonomi khusus, yaitu Provinsi Papua (UU Nomor 35 Tahun 2008) dan Provinsi Aceh (UU Nomor 11 Tahun 2006).

#### 2.2.4.1 Fiscal Federalism

Teori ini dipopulerkan oleh Musgrave pada tahun 1959 dan Oates pada tahun 1972. Inti dari teori ini adalah bahwa diperlukan sebuah *revenue and expenditure assignment* antar level pemerintahan (pusat dan daerah) dengan tujuan utama

peningkatan kesejahteraan rakyatnya (Khusnaini, 2006). Dalam prakteknya, kegiatan demikian lebih dikenal dengan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, di mana pemerintah daerah diberikan limpahan wewenang oleh pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintahannya.

Teori *fiscal federalism* ini memiliki asumsi bahwa pemerintah daerah bersifat sangat bijaksana dan akan selalu berusaha membuat keputusan-keputusan publik yang efisien dan sesuai dengan preferensi kolektif masyarakatnya (Khusnaini, 2006). Tujuan akhirnya masalah sama, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal/daerah. Dengan adanya hal ini, suatu daerah bukannya dituntut untuk selalu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, tapi di sisi lain juga didorong untuk terus menggali dan memanfaatkan potensi daerah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

## **2.2.5 Kerangka Pemikiran**

### **2.2.5.1 Hubungan Pengeluaran per Kapita Penduduk Sebulan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Pengeluaran merupakan kegiatan yang besarnya dipengaruhi oleh pendapatan. Pendapatan yang tinggi akan berimbas pada pengeluaran yang tinggi pula. Bila pendapatan menurun, maka rumah tangga juga memiliki kecenderungan akan menunda konsumsi. Maka bila diruntut lebih jauh, kenaikan pengeluaran riil mengindikasikan kenaikan pendapatan, sedangkan kenaikan pendapatan riil mengindikasikan kenaikan kesejahteraan. Kenaikan pendapatan ini akan meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena pendapatan merupakan salah satu variabel yang digunakan dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

### **2.2.5.2 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Bidang Kesehatan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Salah satu peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai penyedia barang publik. Pada tahap yang lebih lanjut, barang publik merupakan infrastruktur yang pihak swasta enggan untuk menyediakannya. Dalam penyediaan infrastruktur, pemerintah menggunakan pengeluaran pemerintah yang salah satu pendanaannya berasal dari pajak.

Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan digunakan untuk membangun, memelihara, dan meningkatkan sarana serta prasarana kesehatan guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Peningkatan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan mengindikasikan upaya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan agar kesehatan masyarakat meningkat. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat ini tercermin dalam naiknya angka harapan hidup, turunya nilai kematian bayi, turunnya angka kematian ibu melahirkan, dll.. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

### **2.2.5.3 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Bidang Pendidikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Pendidikan merupakan salah satu *basic needs* dimana pemenuhannya mengindikasikan tingkat kesejahteraan. Pemerataan pendidikan juga merupakan salah satu tujuan perintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai kegiatan pendidikan.



Seperti yang kita ketahui, pendidikan merupakan salah satu aspek yang digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Peningkatan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan diharapkan mampu menaikkan kualitas pendidikan suatu negara. Wujud dari peningkatan pendidikan ada bermacam macam, misalnya saja kenaikan angka rata-rata sekolah dan kenaikan angka melek huruf. Kenaikan pada pengeluaran pemerintah bidang pendidikan secara tidak langsung akan menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu wilayah.

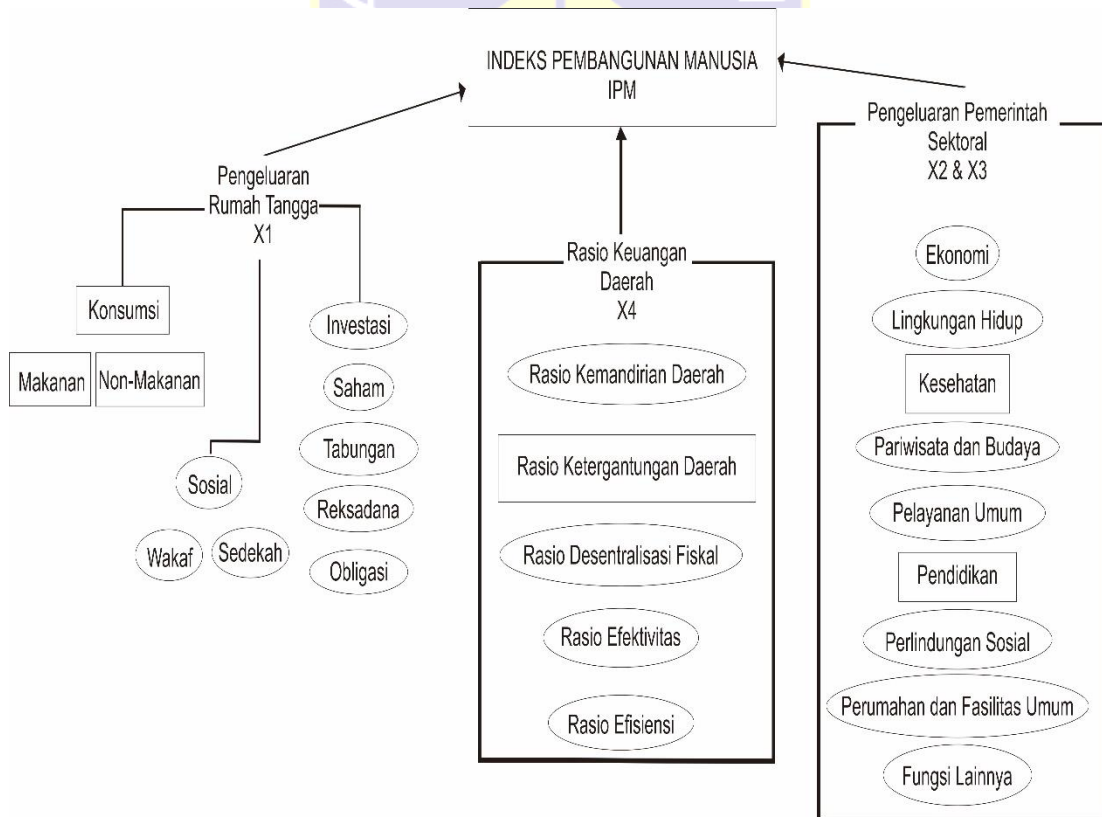
#### **2.2.5.4 Hubungan Rasio Ketergantungan Daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Ketergantungan daerah merupakan suatu kondisi dimana pemerintah daerah memiliki kemampuan yang kecil untuk membiayai kegiatannya sehingga pemerintah daerah mengandalkan sebagian besar dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan teori *fiscal federalism*, dibutuhkan dana transfer dari pusat guna menunjang kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Dengan asumsi bahwa pemerintah daerah bersifat sangat bijaksana dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka dana transfer pusat ini akan dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dalam penerapannya, *fiscal federalism* ini tercermin dalam otonomi daerah. Otonomi daerah memungkinkan daerah memiliki dua jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah dan pendapatan dana transfer. Semakin besar jumlah pendapatan ini, maka peningkatan kesejahteraan akan semakin tinggi. Bila pemerintah daerah mampu meningkatkan PAD sehingga pendapatan total meningkat, maka

dikatakan bahwa pemerintah daerah mampu membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri. Semakin besar persentase dana transfer terhadap total penerimaan, maka semakin besar tingkat ketergantungan suatu daerah. Ketergantungan daerah yang besar akan menurunkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena jumlah alokasi dana yang digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat akan semakin bergantung pada jumlah dana transfer pusat yang besarnya tidak seberapa

**Gambar 2.1**  
**ISLAM**  
**Kerangka Pemikiran**



Keterangan:  tidak dihitung/diamati

### 2.2.6 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan sejumlah teori yang sudah dijabarkan, maka dapat dirumuskan hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Pengeluaran per kapita penduduk berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 33 provinsi di Indonesia. Artinya, apabila pengeluaran per kapita penduduk naik maka akan menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- b. Pengeluaran pemerintah provinsi bidang kesehatan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 33 provinsi di Indonesia. Artinya, apabila pengeluaran pemerintah provinsi bidang kesehatan naik maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga akan naik.
- c. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 33 provinsi di Indonesia. Artinya adalah bahwa jika pengeluaran pemerintah bidang pendidikan naik maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga akan naik.
- d. Rasio ketergantungan daerah berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 33 provinsi di Indonesia. Artinya adalah jika rasio ketergantungan daerah naik maka akan menurunkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kuantitatif, dimana objek penelitian merupakan data yang diperoleh dari perhitungan atau pengukuran suatu objek dan berbentuk angka. Sedangkan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan diolah dari pihak lain yang telah dipublikasikan secara luas.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, dimana data panel merupakan gabungan dari data *time series* dan *cross section*. Jumlah observasinya sendiri sebanyak 198, dengan data *time series* sejumlah 6 tahun (2008-2013) dan data *cross section* sebanyak 33 (33 provinsi di Indonesia). Data diperoleh dari berbagai sumber seperti BPS, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, publikasi berkala BPS, dan *website* pemerintah daerah.

Pada tahun penelitian ini dilakukan (2017), jumlah provinsi di Indonesia telah mengalami penambahan yang mulanya berjumlah 33 provinsi menjadi 34 provinsi. Namun penulis hanya menggunakan data 33 provinsi dikarenakan Provinsi Kalimantan Utara yang baru dibentuk pada tahun 2014 belum memiliki data yang lengkap. Maka dari itu jumlah data *cross section* dalam penelitian ini hanya berjumlah 33 provinsi.

## **3.2 Definisi Operasional Variabel**

Pada bagian ini akan dijelaskan variabel-variabel apa saja yang akan digunakan dalam penelitian ini, baik variabel dependen maupun variabel independen.

### **3.2.1 Variabel Independen**

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen dan besarnya dapat diubah sesuai keinginan. Variabel independen juga sering disebut dengan variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan dijelaskan sebagai berikut.

#### **3.2.1.1 Variabel Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk (X1)**

Konsumsi per kapita sebulan penduduk didefinisikan sebagai rata-rata konsumsi yang dikeluarkan penduduk daerah perkotaan dan pedesaan dalam satu bulan, baik berupa konsumsi makanan maupun konsumsi non makanan. Data yang digunakan merupakan data dari 33 provinsi di Indonesia mulai tahun 2008-2013. Satuan dari variabel ini adalah rupiah.

#### **3.2.1.2 Variabel Pengeluaran Pemerintah Provinsi Bidang Kesehatan (X2)**

Pengeluaran pemerintah provinsi bidang kesehatan merupakan anggaran pemerintah provinsi yang dialokasikan untuk peningkatan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat dari 33 provinsi di Indonesia. Data yang dikumpulkan mulai dari tahun 2008-2013 dengan satuan rupiah.

#### **3.2.1.3 Variabel Pengeluaran Pemerintah Provinsi Bidang Pendidikan (X3)**

Pengeluaran pemerintah provinsi bidang pendidikan merupakan anggaran pendidikan dari APBD yang dialokasikan untuk peningkatan kualitas pendidikan di 33

provinsi di Indonesia. Rentang waktu yang diamati adalah tahun 2008-2013 dengan satuan rupiah.

#### **3.2.1.4 Variabel Rasio Ketergantungan Daerah (X4)**

Rasio ketergantungan daerah merupakan prosentase dari jumlah dana perimbangan yang diterima oleh masing-masing (terhitung ada 33 provinsi yang diamati) pemerintah provinsi dari pemerintah pusat terhadap total penerimaan daerah. Satuan yang digunakan adalah persen (%) dengan periode anggaran dari tahun 2008-2013.

#### **3.2.2 Variabel Dependen**

Variabel dependen merupakan variabel yang diamati perubahannya dan merupakan variabel hasil dari adanya perubahan variabel independen. Dalam penelitian ini hanya terdapat satu variabel dependen, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dari pembangunan, apakah pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki rentang nilai 1,00 sampai 100,00 dimana semakin tinggi nilai yang diperoleh dari perhitungan IPM, maka semakin baik pembangunan yang berhasil dilakukan. Satuan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks poin.

### **3.3 Metode Analisis Data**

Telah disebutkan sebelumnya bahwa dalam penelitian ini digunakan jenis data panel. Sedangkan metode analisis data menggunakan analisis kausalitas (sebab akibat) sehingga terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel dependen (variabel terikat) dan

variabel independen (variabel bebas). Dalam ekonometrika, jenis data panel memiliki metode pengolahan data khusus, yaitu dengan menggunakan regresi data panel. Regresi data panel ini sedikit berbeda dengan regresi data biasa karena mengandung dua informasi sekaligus, yaitu informasi antar waktu yang diwakili oleh data *time series* dan informasi antar objek yang diwakili oleh data *cross section*.

Menurut Gujarati (2013) data panel memiliki beberapa keuntungan dibanding dengan data *time series* dan *cross section*. Beberapa keuntungan dari data panel adalah sebagai berikut.

- a. Data panel memberikan lebih banyak informasi, variasi, kolinieritas yang lebih kecil, dan *degree of freedom* yang lebih banyak karena terdiri dari objek *time series* dan *cross section*.
- b. Menghasilkan pengukuran sederhana yang lebih baik dari dampak yang terjadi antar variabel dibanding dengan data *cross section* dan *time series* murni.
- c. Memudahkan dalam mempelajari model perilaku yang rumit.
- d. Jumlah data yang lebih banyak menjadikan bias yang terjadi lebih minimum.

Dari hasil pengolahan data menggunakan regresi data panel, ada tiga kemungkinan model regresi yang dapat digunakan (Sriyana, 2014), yaitu sebagai berikut.

- a. Metode *common effect* (diasumsikan intersep dan slope tetap baik antar individu maupun antar waktu).
- b. Metode *fixed effect* (diasumsikan slope tetap namun intersep antar individu berbeda).

- c. Metode *random effect* (diasumsikan slope tetap, namun intersep berbeda baik antar objek maupun antar waktu).

Karena terdapat tiga kemungkinan model dari estimasi data panel, pada tahap selanjutnya akan dilakukan pengujian untuk memilih model mana yang sekiranya paling tepat. Bagaimana dan metode apa yang akan digunakan dalam pengujian ini akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

### 3.3.1 Model *Common Effect*

Model *common effect* merupakan model yang paling sederhana di antara tiga model yang dihasilkan dari regresi data panel. Asumsi utama yang digunakan adalah bahwa slope dan intersep selalu tetap baik antar individu maupun antar waktu (Sriyana, 2014). Sistematis dari model *common effect* ini adalah dengan menggabungkan data *time series* dan *cross section* dalam sebuah *pool data*, sebelum diregresikan dengan menggunakan metode OLS. Bentuk umum dari persamaan model *common effect* adalah sebagai berikut.

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + \beta_3 \ln X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan

$Y_{it}$  : Indeks Pembangunan Manusia

$\beta_0$  : konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  : koefisien  $X_1, X_2, X_3, X_4$

$\ln X_{1it}$  : log dari rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk  
(rupiah)



- $\ln X_{2it}$  : log dari pengeluaran pemerintah provinsi bidang kesehatan (rupiah)
- $\ln X_{3it}$  : log dari pengeluaran pemerintah provinsi bidang pendidikan (rupiah)
- $X_{4it}$  : rasio kemandirian daerah (persen)
- $\epsilon_{it}$  : variabel gangguan (*error*)

Masalah yang biasanya terjadi pada model ini adalah bahwa meskipun nilai dari *R-squared* tinggi, namun secara statistik banyak variabel yang tidak signifikan. Selain itu biasanya nilai dari Durbin-Watson statistiknya rendah, yang artinya kemungkinan terjadinya autokorelasi besar. Asumsi bahwa slope dan intersep yang sama juga menyebabkan keunikan antar objek tidak dapat diamati. Dengan demikian kemungkinan bias dalam hasil estimasi juga besar (Gujarati, 2013).

### 3.3.2 Model *Fixed Effect Least Square Dummy Variable* (LSDV)

Berbeda dengan model *common effect*, model *random effect* memiliki asumsi bahwa intersep antar individu maupun antar waktu saling berbeda untuk masing-masing objek observasi, meskipun slop masih dianggap sama. Dikarenakan adanya perbedaan intersep antar unit, perbedaan ini diakomodasi dengan pembentukan variabel *dummy* (boneka) yang menjelaskan perbedaan lintas unit. Ada dua asumsi yang digunakan dalam model ini, yaitu (Sriyana, 2014):

- a. Asumsi slop konstan dan intersep bervariasi antar unit.
- b. Asumsi slop konstan dan intersep bervariasi antar individu dan antar periode waktu. Dengan menggunakan asumsi ini, variabel boneka yang digunakan

terdiri dari dua jenis, yaitu variabel *dummy* lintas unit dan variabel *dummy* lintas waktu.

Secara umum, persamaan regresi dari model *fixed effect* adalah sebagai berikut.

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + \beta_3 \ln X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \sum_{k=1}^{n=33} \alpha_k D_{ki} + \varepsilon_{it}$$

#### Keterangan

$Y_{it}$	: Indeks Pembangunan Manusia
$\beta_0$	: konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	: koefisien $X_1, X_2, X_3, X_4$
$\ln X_{1it}$	: log dari rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk (rupiah)
$\ln X_{2it}$	: log dari pengeluaran pemerintah provinsi bidang kesehatan (rupiah)
$\ln X_{3it}$	: log dari pengeluaran pemerintah provinsi bidang pendidikan (rupiah)
$X_{4it}$	: rasio kemandirian daerah (persen)
$\alpha_k$	: intersep variabel <i>dummy</i> dari masing-masing provinsi
$D_k$	: variabel <i>dummy</i> dari masing-masing provinsi
$\varepsilon_{it}$	: variabel gangguan ( <i>error</i> )

Meskipun model *fixed effect* memberikan perbedaan antar individu, namun model ini tidak dapat mengidentifikasi dampak dari variabel *time-invariant* (Gujarati, 2013). Terjadinya variabel *time-invariant* dikarenakan intersep tiap individu tidak berubah

seiring perubahan waktu. Variabel *time-invariant* terkadang juga disebut dengan variabel gangguan (*nuisance variable*) atau variabel tersembunyi (*lurking variable*).

### 3.3.3 Model *Random Effect*

Model *random effect* hampir serupa dengan model *fixed effect*. Perbedaannya adalah jika pada model *fixed effect* perbedaan intersep diakomodasi secara langsung karena adanya perbedaan individu dan waktu, pada model *random effect* perbedaan intersep antar individu dan antar waktu disebabkan oleh residual/error yang terjadi secara random. Model *random effect* ini menggunakan teknik *generalized least square* (GLS). Persamaan pada model *random effect* juga masih menggunakan bantuan dari variabel *dummy* untuk menjelaskan perbedaan antar individu. Secara umum, persamaan regresi dari model *random effect* adalah sebagai berikut.

$$Y_{it} = \bar{\beta}_0 + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + \beta_3 \ln X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \sum_{k=1}^n \alpha_k D_{ki} + (\varepsilon_{it} + \mu_i)$$

$$Y_{it} = \bar{\beta}_0 + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + \beta_3 \ln X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \sum_{k=1}^n \alpha_k D_{ki} + v_i$$

Keterangan

$Y_{it}$  : Indeks Pembangunan Manusia

$\bar{\beta}_0$  : rata-rata intersep populasi

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  : koefisien  $X_1, X_2, X_3, X_4$

$\ln X_{1it}$  : log dari rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk  
(rupiah)

$\ln X_{2it}$	: log dari pengeluaran pemerintah provinsi bidang kesehatan (rupiah)
$\ln X_{3it}$	: log dari pengeluaran pemerintah provinsi bidang pendidikan (rupiah)
$X_{4it}$	: rasio kemandirian daerah (persen)
$\alpha_k$	: intersep variabel <i>dummy</i> dari masing-masing provinsi
$D_k$	: variabel <i>dummy</i> dari masing-masing provinsi
$\epsilon_{it}$	: variabel gangguan ( <i>error</i> )
$\mu_i$	: variabel gangguan yang bersifat random
$v_i$	: $\epsilon_{it} + \mu_i$

Model *random effect* menjelaskan bahwa pada model *random effect* nilai titik potong  $\beta_0$  menjelaskan nilai rata-rata semua titik potong *cross section* dan komponen *error* ( $\epsilon_0$ ) menjelaskan deviasi titik potong rata-rata anggota panel (Manurung dkk., 2005).

### 3.4 Pemilihan Model

Karena estimasi regresi data panel memiliki tiga alternatif model, maka harus dipilih salah satu model yang dianggap paling baik dalam memberikan hubungan antara variabel dependen dan independen. Pengujian dilakukan sebanyak dua kali. Pengujian pertama adalah untuk membandingkan antara model *common effect* dan model *fixed effect*. Pengujian yang kedua adalah membandingkan antara model *fixed effect* dan model *random effect*. Dengan menggunakan alat bantu Eviews9, kedua

pengujian ini dapat dilakukan dengan uji Chow (antara *common effect* dan *fixed effect*) dan uji Hausman (antara *common effect* dan *fixed effect*). antara *fixed effect* dan *random effect*

### 3.4.1. Uji Chow

Uji Chow (*Chow test*) dilakukan untuk menentukan mana yang lebih tepat digunakan anatara model *fixed effect* atau model *common effect* (Basuki dan Prawoto, 2016). Perlakuannya adalah, apabila ternyata *fixed effect* lebih baik dari pada model *common effect* maka pengujian akan dilanjutkan pada uji Hausman. Bila ternyata *common effect* lebih baik, maka uji Hausman tidak perlu dilakukan dan model *common effect*-lah yang paling tepat digunakan dalam analisis regresi. Pengujian *fixed effect* dapat dilakukan dengan uji F-statistik. Formulanya sebagai berikut.

$$F = \frac{SSR_R - SSR_U/q}{SSR_U/(n - k)}$$

Keterangan

$SSR_R$  : *resricted sum squaered of resdisuals*

$SSR_U$  : *unresricted sum squared of residuals*

q : jumlah restriksi/pembatas dalam model

n : jumlah observasi

k : jumlah parameter estimasi

Hipotesis dari uji Chow ini adalah sebagai berikut.

$H_0$  = *common effect model* lebih baik dari pada *fixed effect model*

$H_1$  = *fixed effect model* lebih baik dari pada *common effect model*

Pembuatan keputusan antara hipotesis nul ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) adalah dengan melihat nilai dari F-statistik dibandingkan dengan nilai F kritis. Bila nilai F kritis lebih besar dari nilai F-statistik, maka keputusan yang diambil adalah menolak hipotesis nul ( $H_0$ ). Begitu pula sebaliknya, bila ternyata nilai F kritis lebih kecil dari nilai F-statistik maka keputusan yang diambil adalah gagal menolak hipotesis nul ( $H_0$ )/menerima hipotesis alternatif ( $H_1$ ).

### 3.4.2. Uji Hausman

Uji Hausman (*Hausman test*) dilakukan apabila hasil dari uji Chow menunjukkan model *fixed effect* lebih tepat digunakan. Uji Hausman digunakan untuk melihat model manakah yang lebih tepat digunakan antara *fixed effect* atau model *random effect* (Basuki dan Prawoto, 2016). Nilai dari uji Hausman dapat dicari dengan rumus berikut.

$$m = \hat{q} \text{var}(\hat{q})^{-1} \hat{q}$$

Keterangan

$m$  : nilai *Chi-squares* statistik dari uji Hausman

$\hat{q}$  : perbedaan vektor estimator efisien dan tidak efisien

$\text{var}(\hat{q})$  : kovarian matriks perbedaan vektor estimator efisien dan tidak efisien

Hipotesis dari uji Hausman adalah sebagai berikut.

$H_0 = \text{random effect model}$  lebih baik dari pada *fixed effect model*

$H_1 = \text{fixed effect model}$  lebih baik dari pada *random effect model*

Hasil dari uji Hausman ini mengikuti distribusi *Chi-square*. Pembuatan keputusan antara hipotesis nul ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) adalah dengan melihat nilai dari

*Chi-square* statistik dibandingkan dengan nilai *Chi-square* kritis. *Chi-squares* kritis dapat dilihat pada tabel distribusi *Chi-squares* dengan nilai *degree of freedom* ( $k$ ) adalah jumlah variabel independen. Bila nilai *Chi-square* kritis lebih besar dari nilai *Chi-square* statistik, maka keputusan yang diambil adalah menolak hipotesis nul ( $H_0$ ). Begitu pula sebaliknya, bila ternyata nilai *Chi-square* kritis lebih kecil dari nilai *Chi-square* statistik maka keputusan yang diambil adalah gagal menolak hipotesis nul ( $H_0$ )/menerima hipotesis alternatif ( $H_1$ ).

## 5. Pengujian Statistik

Pengujian statistik dilakukan untuk mengetahui apakah hasil regresi yang diperoleh memiliki ketepatan yang akurat dengan keadaan populasi yang sebenarnya. Pengujian statistik yang akan dilakukan pada penelitian ini meliputi pengujian koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji kelayakan model (uji F), dan uji signifikansi variabel individual (uji t).

### 3.5.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa baik garis regresi dengan nilai aktualnya (Widarjono, 2010). Nilai dari koefisien determinasi ini berkisar antara 0-1, dimana semakin mendekati 1 maka variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen. nilai dari koefisien determinasi ini dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut.

$$R^2 = \frac{ESS}{ESS + RSS}$$

Keterangan:

$R^2$  = koefisien determinasi

ESS = *explained sum of squares*

RSS = *residual sum of squares*

Nilai koefisien determinasi ini akan terus bertambah jika variabel independen bertambah. Maka dari itu, salah satu alternatif untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menggunakan *adjusted R<sup>2</sup>* atau koefisien determinasi yang disesuaikan.

### 3.5.2 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model atau sering disebut uji F merupakan salah satu pengujian apakah semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilai dari F statistik dapat dicari dengan rumus berikut.

$$F = \frac{R^2 / (k - 1)}{1 - R^2 / (n - k)}$$

Keterangan

F = nilai F statistik

$R^2$  = koefisien determinasi

n = jumlah observasi

k = jumlah paramater estimasi

Cara pengujian uji F ini adaah dengan membandingkan nilai dari F kritis dengan nilai F hitung. Nilai dari F kritis dapat dicari dengan mencari *degree of freedom*. Terdapat 2 *degree of freedom* dalam tabel distribusi F, yaitu *df(N1)* dan *df(N2)* yang dapat dicari dengan rumus:



$$df(N1) = k - 1$$

$$df(N2) = n - k$$

Keterangan

$n$  = jumlah observasi

$k$  = jumlah variabel yang diteliti (variabel independen dan dependen)

Setelahnya, uji F membutuhkan hipotesis untuk menentukan keputusan yang akan diambil. Hipotesis yang dirumuskan dari uji F ini adalah sebagai berikut.

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ , secara simultan tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

$H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$ , secara simultan ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Pembuatan keputusan antara hipotesis nul ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) adalah dengan melihat nilai dari F-statistik dibandingkan dengan nilai F kritis. Bila nilai F kritis lebih besar dari nilai F-statistik, maka keputusan yang diambil adalah menolak hipotesis nul ( $H_0$ ). Begitu pula sebaliknya, bila ternyata nilai F kritis lebih kecil dari nilai F-statistik maka keputusan yang diambil adalah gagal menolak hipotesis nul ( $H_0$ )/menerima hipotesis alternatif ( $H_1$ ).

### 3.5.3 Uji Signifikansi Variabel Independen (Uji t)

Uji signifikansi variabel independen sering disebut uji t karena pengujian ini mengikuti distribusi tabel t. Uji ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Rumus dalam mencari nilai dari t kritis adalah dengan melihat daftar tabel distribusi t sesuai dengan derajat

kepercayaan yang telah ditentukan di awal. Dalam penelitian ini, nilai dari derajat kepercayaan yang digunakan adalah sebesar 5% (0,05), sehingga nilai dari t kritis dapat dicari dengan menentukan df (*degree of freedom*) dengan rumus  $df = n - k$ . Definisi dari n adalah jumlah observasi dan k merupakan jumlah variabel yang diteliti (variabel independen dan dependen). nilai dari t stati

$$t = \frac{C_0}{SE}$$

Keterangan

t : nilai t statistik

$C_0$  : koefisien dari variabel regresi

SE : *standar error*

Hipotesis yang dirumuskan dari masing-masing variabel independen adalah sebagai berikut.

Untuk variabel rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk (X1)

$H_0 : \beta_1 = 0$ , variabel rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk (X1) tidak berpengaruh terhadap IPM (Y).

$H_1 : \beta_1 > 0$ , variabel rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk (X1) berpengaruh positif terhadap IPM (Y).

Untuk variabel pengeluaran pemerintah provinsi bidang kesehatan (X2)

$H_0 : \beta_2 = 0$ , variabel pengeluaran pemerintah provinsi bidang kesehatan (X2) tidak berpengaruh terhadap IPM (Y).

$H_1 : \beta_2 > 0$ , variabel pengeluaran pemerintah provinsi bidang kesehatan (X2) berpengaruh positif terhadap IPM (Y).

Untuk variabel pengeluaran pemerintah provinsi bidang pendidikan (X3)

$H_0 : \beta_3 = 0$ , variabel pengeluaran pemerintah provinsi bidang pendidikan (X3) tidak berpengaruh terhadap IPM (Y).

$H_1 : \beta_3 > 0$ , variabel pengeluaran pemerintah provinsi bidang pendidikan (X3) berpengaruh positif terhadap IPM (Y).

Untuk variabel pengeluaran rasio ketergantungan daerah (X4)

$H_0 : \beta_4 = 0$ , variabel rasio ketergantungan daerah (X4) tidak berpengaruh terhadap IPM (Y).

$H_1 : \beta_4 < 0$ , variabel rasio ketergantungan daerah (X4) berpengaruh negatif terhadap IPM (Y).

Keputusan yang diambil dari hipotesis di atas adalah dengan membandingkan nilai dari t kritis dan nilai t-statistik. Bila nilai t kritis lebih besar dari nilai t statistik, maka keputusan yang diambil adalah menolak hipotesis nul ( $H_0$ ). Begitu pula sebaliknya, bila ternyata nilai t kritis lebih kecil dari nilai t statistik maka keputusan yang diambil adalah gagal menolak hipotesis nul ( $H_0$ )/menerima hipotesis alternatif ( $H_1$ ).

## **BAB IV**

### **HASIL DAN ANALISIS**

#### **4.1 Deskripsi Data Penelitian**

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan publikasi tahunan dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. Total data yang digunakan terhitung sebanyak 198, dengan data *time series* dari tahun 2008-2013 dan data *cross section* sebanyak 33 Propinsi di Indonesia. Penggunaan data *cross section* hanya berjumlah 33 dikarenakan Propinsi Kalimantan Utara tidak dimasukkan karena merupakan Propinsi baru dari pemekaran Propinsi Kalimantan Timur di tahun 2014, sehingga berakibat pada ketersediaan data yang belum memadai.

Data yang dijadikan sebagai variabel penelitian meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk, pengeluaran pemerintah propinsi bidang kesehatan, pengeluaran pemerintah propinsi bidang pendidikan, dan rasio ketergantungan daerah yang terdiri dari data jumlah dana perimbangan dan total penerimaan daerah. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan menggunakan perangkat lunak Eviews9 dengan menggunakan metode regresi data panel. Hasil pengolahan data akan dianalisis sesuai dengan model regresi yang dianggap paling tepat.

## **4.2 Gambaran Umum Objek Penelitian**

### **4.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia mengalami perubahan metode sejak tahun 2010. Pada tahun sebelum 2010, metode yang digunakan adalah metode lama, sedangkan pada perhitungan IPM mulai tahun 2010 menggunakan metode baru. Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, komponen-komponen IPM masih mencakup 3 hal dasar yang dianggap penting, yaitu aspek pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Dalam penelitian ini, penulis memutuskan untuk menggunakan IPM dengan perhitungan metode lama. Hal demikian dilakukan karena ketersediaan data yang dibutuhkan dalam penelitian belum mengakomodasi perhitungan IPM dengan metode baru untuk tahun 2008-2009.

Bila diamati, secara umum Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun 2008-2013. Hal ini terlihat dalam tabel yang disajikan dalam Lampiran I bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di semua provinsi di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun 2008-2013. Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini mencerminkan bahwa kualitas pendidikan, kesehatan, standar hidup rata-rata orang Indonesia juga mengalami peningkatan tiap tahunnya.

### **4.2.2 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk**

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan oleh Keynes, yang mempengaruhi besar kecilnya konsumsi seseorang adalah pendapatan. Pendapatan yang tinggi suatu daerah memiliki kecenderungan jumlah konsumsi per kapita yang tinggi pula. Hal ini

dicerminkan dari *Marginal Propensity to Consume* yang nilainya akan meningkat seiring bertambahnya pendapatan (Y). Lebih jauh lagi, keputusan untuk menambah atau mengurangi pengeluaran konsumsi saat pendapatan bertambah tergantung pada besar kecilnya pendapatan tetap dan pendapatan tidak tetap atau bahkan siklus hidup manusia yang mengharuskan seseorang untuk mengalokasikan pendapatannya guna berkonsumsi masa sekarang dan masa depan (Mankiw, 2007). Namun secara umum, bertambahnya pendapatan akan cenderung meningkatkan konsumsi seseorang.

Data yang telah dikumpulkan dari BPS tersaji dalam Lampiran II yang merupakan tabel rata-rata pengeluaran kapita per bulan tiap Provinsi di Indonesia dari tahun 2008-2013. Jika diamati, terlihat bahwa semua provinsi di Indonesia rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk mengalami kenaikan tiap tahunnya. Ini merupakan salah satu indikasi bahwa kesejahteraan penduduk Indonesia terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Kenaikan pengeluaran merupakan imbas dari kenaikan pendapatan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Keynes pada bagian sebelumnya.

#### **4.2.3 Pengeluaran Pemerintah Provinsi Bidang Kesehatan**

Pengeluaran Pemerintah Provinsi bidang kesehatan dalam penelitian ini adalah APBD masing-masing provinsi tiap tahunnya. Nilai ini merupakan APBD yang disahkan oleh pemerintah pusat dan bukan merupakan nilai dari realisasi APBD. Satuan dari variabel ini adalah rupiah (Rp).

Bila diamati pada Lampiran III, nilai dari pengeluaran pemerintah bidang kesehatan (hampir di semua provinsi) terus mengalami penurunan pada tahun 2012 dan 2013, meskipun pada 4 tahun sebelumnya terus naik. Meskipun demikian, kaitan antara

penurunan pengeluaran pemerintah provinsi bidang kesehatan ini belum tentu turut menurunkan IPM di tiap daerah. Apakah penurunan pada 2 tahun terakhir ini berpengaruh pada penurunan IPM atau tidak akan dibahas lebih lanjut pada bagian selanjutnya.

#### **4.2.4 Pengeluaran Pemerintah Provinsi Bidang Pendidikan**

Pengeluaran Pemerintah Provinsi bidang pendidikan dalam penelitian ini adalah APBD masing-masing provinsi tiap tahunnya yang dialokasikan khusus untuk peningkatan pendidikan. Nilai ini merupakan APBD yang disahkan oleh pemerintah pusat dan bukan merupakan nilai dari realisasi APBD. Satuan dari variabel ini adalah rupiah (Rp).

Masih memiliki kasus serupa dengan pengeluaran pemerintah provinsi bidang kesehatan, berdasarkan pada Lampiran IV dapat diamati bahwa variabel ini juga mengalami penurunan hampir di semua provinsi pada tahun 2012 dan 2013. Pengujian apakah penurunan ini secara statistik berimbas pada nilai IPM daerah akan dilakukan pada bagian selanjutnya pada bagian ini.

#### **4.2.5 Rasio Ketergantungan Daerah**

Nilai dari rasio ketergantungan daerah diperoleh dengan membandingkan antara jumlah dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat terhadap total penerimaan daerah tiap tahunnya. Dengan demikian satuan dari variabel ini adalah persen (%).

Setiap daerah memiliki nilai yang bervariasi tiap tahunnya. Data mengenai rasio ketergantungan daerah disajikan dalam Lampiran V. Berdasarkan data tersebut, untuk

beberapa daerah, rasio ini memiliki kecenderungan yang menurun. Akan tetapi, masih sangat banyak daerah yang juga masih memiliki rasio keergantungan yang tinggi dan sangat lambat mengalami perbaikan dari waktu ke waktu.

### **4.3 Hasil Estimasi Regresi Data Panel**

Pengolahan data dengan menggunakan metode regresi data panel akan menghasilkan 3 hasil estimasi, yaitu *common effect models*, *fixed effect models*, dan *roandom effect models*. Di antara ketiga hasil estimasi ini akan dipilih satu model yang dianggap paling baik dalam memberikan penjelasan dari proses pengolahan data. Hasil dari ketiga model regresi dijabarkan sebagai berikut.

#### **4.3.1 Hasil Common Effect Models**

Pada model *common effect* slope dan intersep antar individu maupun antar waktu dianggap tetap. Model ini merupakan model regresi data panel yang paling sederhana karena mengabaikan pengaruh individu dan waktu pada model yang dibentuknya (Sriyana, 2014). Hasil estimasi dari model *common effect* disertakan pada lampiran pada bab selanjutnya.

#### **4.3.2 Hasil Fixed Effect Models**

Berbeda dengan model *common effect*, model *fixed effect* menganggap bahwa tiap individu/unit memiliki konstanta antar obyek (dapat berupa individu maupun waktu) yang berbeda namun besarnya koefisien regresi tetap dianggap sama (Sriyana, 2014). Implikasi dari digunakannya model ini adalah terdapatnya variabel *dummy* yang menjelaskan perbedaan konstanta antar objek observasi. Hasil dari estimasi regresi data panel dengan model *fixed effect* disertakan pada bagian lampiran.



### 4.3.3 Hasil *Random Effect Models*

Model *random effect* mengakomodasi perbedaan antar obyek (dapat antar individu maupun waktu), namun perbedaan konstanta antar obyek disebabkan adanya residual/eror pada obyek berbeda yang bersifat random (Sriyana, 2014). Intersep regresi dianggap tetap dan persamaan regresinya juga menggunakan variabel *dummy*. Hasil dari regresi *random effect* disertakan pada bagian lampiran.

## 4.4 Pemilihan Model Regresi

### 4.4.1 *Chow Test*

Uji Chow digunakan untuk mengetahui apakah model regresi *common effect* lebih baik digunakan dibanding model *fixed effect*. Untuk mengetahuinya dengan melihat uji F-statistik dengan hipotesis sebagai berikut

$H_0 = \text{common effect model lebih baik dari pada fixed effect model}$

$H_1 = \text{fixed effect model lebih baik dari pada common effect model}$

Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan melihat nilai *F-statistic*, yang kesmudian menentukan hipotesis mana yang akan digunakan. Di bawah ini disajikan hasil dari uji Chow menggunakan aplikasi Eviews9.

Tabel 4.1

Hasil Uji Chow (*Chow Test*)

Redundant Fixed Effects Tests			
Pool: FE			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	387.145052	(32,161)	0.0000
Cross-section Chi-square	862.496519	32	0.0000

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan Eviews9

Dari hasil uji Chow dengan menggunakan Eviews9 diperoleh nilai dari *F-statistic* sebesar 387,145052 dengan nilai numerator 32, denominator 161, dan *F-kritis* sebesar 1,525. Karena nilai *F-statistic* > *F kritis*, maka hasilnya adalah menolak  $H_0$ . Dengan demikian kesimpulannya adalah bahwa model *fixed effect* lebih tepat digunakan dibanding dengan model *common effect*.

#### 4.4.2 Hausman Test

Karena pada pengujian Chow diperoleh hasil model *fixed effect* lebih tepat digunakan, maka langkah selanjutnya adalah menguji apakah model *random effect* lebih baik dari model *fixed effect* dengan menggunakan uji Hausman. Uji Hausman digunakan untuk membandingkan mana yang lebih tepat digunakan antara model *fixed effect* dan *random effect*. Berbeda dengan uji Chow, uji Hausman dilakukan dengan membandingkan nilai *Chi-Sq. Statistic* yang diperoleh dari pengolahan data pada Eviews9. Hipotesis yang dijabarkan untuk uji Hausman ini adalah sebagai berikut.

$H_0 = \text{random effect model lebih baik dari pada fixed effect model}$

$H_1 = \text{fixed effect model lebih baik dari pada random effect model}$

Tabel 4.2

Hasil Uji Hausman (*Hausman Test*)

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Pool: RE			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	14.595548	4	0.0056

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan Eviews9

Dari hasil uji Hausman dengan menggunakan Eviews9 diperoleh nilai dari *Chi-Sq. Statistic* sebesar 14,595548. Derajat keyakinan yang digunakan adalah 5% dengan df 4, sehingga diperoleh nilai Chi Squares kritis 7,77943. Karena nilai *Chi-Sq. Statistic* > Chi Squares kritis, maka hasilnya adalah menolak  $H_0$ . Dengan demikian kesimpulannya adalah bahwa model *fixed effect* lebih tepat digunakan dibanding dengan model *random effect*.

#### 4.5 Evaluasi Hasil Regresi *Fixed Effect Models*

Pada pegujian untuk memilih model mana yang paling tepat digunakan dalam analisis data panel, diperoleh hasil bahwa model regresi yang paling tepat digunakan adalah model *fixed effect*. Selanjutnya, hasil regresi yang diperoleh akan dievaluasi untuk melihat lebih lanjut hubungan kausalitas variabel dependen dan independen. Evaluasi hasil regresi meliputi koefisien determinasi, uji F (uji serentak), dan uji signifikansi.

Tabel 4.3

Hasil Estimasi *Fixed Effect Models*

Dependent Variable: Y?				
Method: Pooled Least Squares				
Sample: 2008 2013				
Included observations: 6				
Cross-sections included: 33				
Total pool (balanced) observations: 198				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	27.33556	2.041109	13.39250	0.0000
LOG(X1?)	2.946883	0.156674	18.80907	0.0000
LOG(X2?)	0.248180	0.074311	3.339738	0.0010
LOG(X3?)	0.009883	0.066043	0.149645	0.8812
X4?	-0.014688	0.003776	-3.889578	0.0001
Fixed Effects (Cross)				
_ACH—C	-0.751327		_LAM—C	-0.037063
_BABEL—C	0.658843		_MAL—C	0.484434
_BAL—C	-0.526508		_MALUT—C	-1.946872
_BAN—C	-2.230045		_NTB—C	-5.476776
_BENG—C	1.531760		_NTT—C	-2.995861
_DIY—C	3.868106		_PABAR—C	-2.887640
_DKI—C	2.519115		_PAP—C	-7.292964
_GOR—C	0.023291		_RIA—C	3.402610
_JABAR—C	-0.320714		_SUBAR—C	1.586875
_JAM—C	1.246754		_SULBAR—C	-0.298384
_JATENG—C	0.611823		_SULRA—C	-0.840252
_JATIM—C	-0.481769		_SULSEL—C	-0.126503
_KALBAR—C	-2.409521		_SULTENG—C	-0.081289
_KALSEL—C	-2.666786		_SULUT—C	4.561758
_KALTENG—C	2.751702		_SUMSEL—C	1.291379
_KALTIM—C	2.291177		_SUMUT—C	2.055429
_KEPRI—C	2.485221			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.993740	Mean dependent var	72.12500	
Adjusted R-squared	0.992341	S.D. dependent var	3.038213	
S.E. of regression	0.265895	Akaike info criterion	0.355444	
Sum squared resid	11.38273	Schwarz criterion	0.969918	
Log likelihood	1.811015	Hannan-Quinn criter.	0.604163	
F-statistic	709.9908	Durbin-Watson stat	1.127479	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Pengolahan data dengan menggunakan Eviews9

#### 4.5.1 Pengujian Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan seberapa besar kesesuaian garis regresi yang dibentuk dengan data (Sriyana, 2014). Semakin besar nilai  $R^2$  menandakan bahwa semakin kecil eror yang terjadi pada hasil estimasi. Pada hasil regresi dengan model *fixed effect*, nilai *R-squared* sebesar 0,99374 atau 99,374%. Artinya bahwa 99,374% dari variasi IPM di 33 Provinsi di Indonesia dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang dipilih dalam model (rata-rata pengeluaran penduduk, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, dan rasio ketergantungan daerah). Sisanya yang sebesar 0,626% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

#### 4.5.2 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk melihat apakah semua variabel independen di dalam model mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama (serempak). Dari hasil estimasi dengan menggunakan model *fixed effect* diperoleh bahwa nilai dari *F-statistic* adalah 709,9908 dengan tingkat alpha 5%. Sedangkan nilai numeratornya dan denominator sebesar 36 dan 161, sehingga nilai F kritis yang diperoleh adalah 1,49059. Hasilnya adalah bahwa *F-statistic* > F kritis yang berarti menolak hipotesis nol ( $H_0$ ) dan gagal menolak hipotesis alternatif ( $H_1$ ). Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa secara bersama-sama semua variabel independen dalam model (rata-rata pengeluaran penduduk, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, dan rasio ketergantungan daerah) berpengaruh dan signifikan terhadap variabel dependen (IPM).

### 4.5.3 Uji Signifikansi Variabel Independen (Uji t)

Uji signifikansi dilakukan guna melihat pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Pada bagian ini selain dijelaskan tingkat signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen, juga akan dilakukan pengujian hipotesis penelitian yang telah dikemukakan pada bagian BAB sebelumnya.

**Tabel 4.4**

**Hasil Statistik t-Hitung**

Variabel	t-Kritis	t-Statistik*	Keterangan
LOG(X1)	1,97481	18,80907	signifikan
LOG(X2)	1,97481	3,339738	signifikan
LOG(X3)	1,97481	0,149645	Tidak signifikan
LOG(X4)	-1,97481	-3,889578	signifikan
$\alpha = 5\%$ dengan $df = N-k = 198 - 37 = 161$			

\* Merupakan uji 1 sisi

#### 4.5.3.1 Variabel Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk (X1)

Dari hasil pengolahan data diketahui bahwa variabel rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk memiliki nilai dari *t-statistic* adalah sebesar 18,80907 dan nilai t kritisnya adalah 1,97481. Keputusan yang diambil adalah menolak hipotesis nol ( $H_0$ ) karena nilai *t-statistic* > t kritisnya. Kesimpulan yang dapat diambil adalah rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

#### 4.5.3.2 Variabel Pengeluaran Pemerintah Provinsi Bidang Kesehatan (X2)

Variabel pengeluaran pemerintah provinsi bidang kesehatan memiliki nilai *t-statistic* sebesar 3,339738 dan t kritisnya sebesar 1,97481. Nilai *t-statistic* > t kritis

sehingga keputusan yang diambil adalah menolak hipotesis nol ( $H_0$ ). Kesimpulan yang dapat diambil yaitu bahwa pengeluaran pemerintah provinsi bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Penelitian yang dilakukan oleh Bhakti dkk. (2014) juga menunjukkan bahwa APBD sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan IPM daerah.

#### **4.5.3.3 Variabel Pengeluaran Pemerintah Provinsi Bidang Pendidikan (X3)**

Dari hasil estimasi regresi, diketahui bahwa nilai dari *t-statistic* sebesar 0,149645 dan *t* kritis sebesar 1,97481. Keputusan yang diambil adalah gagal menolak hipotesis nol ( $H_0$ ) karena nilai *t-statistic* < *t* kritisnya. Kesimpulan yang dapat diambil adalah variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Penelitian yang dilakukan di Yogyakarta (Badrudin dan Khasanah, 2011) juga menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM daerah.

#### **4.5.3.4 Variabel Derajat Ketergantungan Daerah (X4)**

Derajat ketergantungan daerah memiliki nilai *t-statistic* sebesar -3,889578 dan nilai *t* kritisnya -1,97481. Uji yang digunakan adalah uji 2 sisi sehingga mencakup wilayah bernilai negatif, sehingga *t-statistic* < *t* kritis dan keputusannya adalah menolak  $H_0$ . Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa variabel derajat kemandirian daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Penelitian yang dilakukan oleh Bhakti dkk. (2014) juga memiliki hasil yang sama untuk variabel rasio kemandirian daerah.

## 4.6 Interpretasi Hasil Analisis

Hasil dari uji signifikansi menunjukkan bahwa hanya 3 variabel independen yang memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM provinsi di Indonesia. Ketiga variabel itu adalah rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk (X1), pengeluaran pemerintah bidang kesehatan (X2), dan rasio ketergantungan daerah (X4). Sedangkan variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan ternyata tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM. Bagian ini akan dijelaskan 2 efek yang terjadi dalam model *fixed effect*, yaitu persamaan regresi dengan slope yang sama dan persamaan koefisien dan intersep pembeda tiap daerah.

### 4.6.1 Persamaan Regresi Slope Sama

Variabel rata-rata pengeluaran per kapiata sebulan penduduk (X1) memiliki koefisien 2,946883. Artinya adalah bahwa setiap kenaikan 1% dari pengeluaran penduduk per bulan akan mengakibatkan kenaikan IPM propinsi sebesar 2,946883 poin. Hal demikian sesuai dengan teori dimana bila pengeluaran (konsumsi) meningkat juga merupakan indikasi bahwa kesejahteraan penduduk meningkat, mengingat bahwa IPM merupakan suatu ukuran yang salah satunya berfungsi untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu komunitas.

Variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan (X2) memiliki koefisien sebesar 0,248180 dan signifikan. Artinya adalah setiap kenaikan 1% dari pengeluaran bidang kesehatan pemerintah provinsi akan mampu meningkatkan IPM provinsi sebesar 0,248180. Dalam praktiknya, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dilakukan guna memfasiliasi rakyat guna mencapai tingkat kesehatan yang lebih



tinggi. Anggaran bidang kesehatan digunakan untuk untuk mencapai tujuan ini. Alokasi dana yang lebih besar pada anggaran pengeluaran pemerintah diharapkan mampu secara nyata meningkatkan mutu dan kualitas kesehatan masyarakat. Naiknya mutu dan kualitas kesehatan masyarakat ini akan meningkatkan produktivitas dan peningkatan IPM.

Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (X3) memiliki koefisien sebesar 0,009883 namun secara statistik tidak signifikan. Artinya, meskipun memiliki hubungan positif terhadap IPM, namun pengeluaran pemerintah bidang pendidikan tidak mempengaruhi kenaikan IPM. Hal ini mungkin terjadi selain dikarenakan kecilnya jumlah pengeluaran yang dialokasikan di sektor pendidikan (ditandai dengan kecilnya koefisien dari variabel X3), juga karena *sense of education* mayoritas penduduk masih rendah (Badrudin dan Khasanah, 2011). Hal demikian bisa saja terjadi karena keinginan masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi masih kurang, meskipun di beberapa tempat fasilitas pendidikan yang disediakan oleh pemerintah telah memadai. Rendahnya tingkat pendidikan mengindikasikan rendahnya produktivitas, dan pada akhirnya rendahnya produktivitas akan menarik seseorang pada tingkat kesejahteraan yang rendah pula.

Varibel rasio ketergantungan daerah (X4) memiliki -0,014688 dan signifikan secara statistik. Artinya adalah bahwa setiap penurunan 1% rasio ketergantungan keuangan provinsi akan menaikkan nilai IPM sebesar -0,014688 poin. Semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah pada dana transfer dari pemerintah pusat, maka hal ini akan menurunkan tingkat IPM daerah yang bersangkutan. Jika diamati, mayoritas

provinsi di Indonesia memiliki rata-rata rasio ketergantungan daerah sebesar 50%. Artinya, dalam pelaksanaannya, 50% dana APBD bergantung pada kucuran dana transfer pemerintah daerah. Parahnya, dari tahun ke tahun nilai derajat ketergantungan daerah tidak mengalami penurunan yang signifikan. Dengan kata lain, kemampuan daerah dalam mengelola dan memaksimalkan potensi BUMD masih sangat kurang. Bila potensi-potensi daerah ini mampu dimaksimalkan, maka akan membantu membuka lapangan kerja dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

#### 4.6.2 Persamaan Koefisien dan Intersep Pembeda

Sesuai dengan asumsi yang digunakan pada model *fixed effect*, masing-masing intersep *cross section* menandakan bahwa tiap provinsi memiliki kemampuan yang berbeda dalam implementasi variabel independen dalam meningkatkan IPM. Berikut adalah nilai dari masing-masing koefisien pembeda *cross section* secara lebih detail.

**Tabel 4.5**

#### Nilai Intersep dan Sampel Provinsi

Provinsi	Intersep	Koefisien Regresi	Konstanta Daerah	Peringkat
Aceh	-0.751327	27.3356	26.5842	25
Bangka Belitung	0.658843	27.3356	27.9944	13
Bali	-0.526508	27.3356	26.8091	24
Bengkulu	-2.230045	27.3356	25.1055	10
Banten	1.53176	27.3356	28.8673	16
DI Yogyakarta	3.868106	27.3356	31.2037	2
DKI Jakarta	2.519115	27.3356	29.8547	5
Gorontalo	0.023291	27.3356	27.3589	17
Jawa Barat	-0.320714	27.3356	27.0148	21

Jambi	1.246754	27.3356	28.5823	12
Jawa Tengah	0.611823	27.3356	27.9474	14
Jawa Timur	-0.481769	27.3356	26.8538	23
Kalimantan Barat	-2.409521	27.3356	24.926	28
Kalimantan Selatan	-2.666786	27.3356	24.6688	29
Kalimantan Tengah	2.751702	27.3356	30.0873	4
Kalimantan Timur	2.291177	27.3356	29.6267	7
Kepulauan Riau	2.485221	27.3356	29.8208	6
Lampung	-0.037063	27.3356	27.2985	18
Maluku	0.484434	27.3356	27.82	15
Maluku Utara	-1.946872	27.3356	25.3887	27
Nusa Tenggara Barat	-5.476776	27.3356	21.8588	32
Nusa Tenggara Timur	-2.995861	27.3356	24.3397	31
Papua Barat	-2.88764	27.3356	24.4479	30
Papua	-7.292964	27.3356	20.0426	33
Riau	3.40261	27.3356	30.7382	3
Sumatera Barat	1.586875	27.3356	28.9224	9
Sulawesi Barat	-0.298384	27.3356	27.0372	22
Sulawesi Tenggara	-0.840252	27.3356	26.4953	26
Sulawesi Selatan	-0.126503	27.3356	27.2091	18
Sulawesi Tengah	-0.081289	27.3356	27.2543	19
Sulawesi Utara	4.561758	27.3356	31.8973	1
Sumatera Selatan	1.291379	27.3356	28.6269	11
Sumatera Utara	2.055429	27.3356	29.391	8

Tercatat 3 provinsi yang memiliki koefisien *cross section* paling tinggi, yaitu Provinsi Sulawesi Utara (31,8973), Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (31.07507), dan Provinsi Riau (30.60469). Artinya adalah bahwa pada saat masyarakatnya tidak berkonsumsi dan pemerintah sama sekali tidak ikut campur dalam kegiatan ekonomi masyarakat, ketiga provinsi di atas memiliki kinerja dalam meningkatkan IPM sebesar

31.763 (Provinsi Sulawesi Utara), 31,2037 (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta), 30,7382 (Provinsi Riau) per tahunnya, sedangkan provinsi lain memiliki kemampuan meningkatkan IPM yang lebih rendah. Untuk 3 provinsi dengan kemampuan meningkatkan IPM paling rendah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Papua dengan nilai koefisien *cross section* berurut-turut 24,3397; 21,8588; 20,0426.

Bila diamati lebih lanjut, 3 provinsi dengan kemampuan terendah dalam meningkatkan IPM merupakan provinsi yang berada di kawasan Indonesia Tengah dan Timur. Hal seperti ini sangatlah masuk akal mengingat tingkat konsentrasi pembangunan yang dilakukan pemerintah juga cenderung rendah di kawasan ini. Rendahnya perhatian pemerintah mengakibatkan lambatnya perkembangan di segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk infrastruktur dan ketersediaan fasilitas yang masih sangat terbatas. Hal ini pada akhirnya menyebabkan kesejahteraan masyarakat yang rendah karena tekanan dari berbagai aspek, baik aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dll..

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN IMPLIKASI**

#### **5.1. Simpulan**

Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini berarti bahwa saat pengeluaran per kapita sebulan penduduk naik, maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga akan mengalami peningkatan.
2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah provinsi bidang kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Artinya bahwa saat pemerintah provinsi menaikkan anggaran belanja di bidang kesehatan maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di provinsi yang bersangkutan.
3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Artinya adalah saat pemerintah provinsi menaikkan anggaran belanja bidang pendidikan maka tidak akan mempengaruhi nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

4. Hasil penelitian ini menunjukkan rasio ketergantungan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ini menunjukkan bahwa bila rasio ketergantungan daerah suatu provinsi naik, maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan mengalami penurunan.

## 5.2. Implikasi

Dari hasil penelitian di atas, telah diketahui variabel-variabel apa saja yang berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Maka dari itu dapat diambil beberapa langkah efisien guna terus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai berikut.

1. Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, Pemerintah Daerah dan Pusat harus bekerjasama agar mampu menaikkan pengeluaran per kapita sebulan penduduk, baik secara langsung (tunjangan) maupun tidak langsung (penyediaan infrastruktur dan penanaman modal dalam maupun luar negeri).
2. Alokasi pengeluaran pemerintah bidang kesehatan harus dinaikkan agar nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat. Ini bukan hanya berlaku untuk Pemerintah Daerah saja, namun Pemerintah Pusat juga harus melakukan hal serupa mengingat anggaran bidang kesehatan memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah.
3. Pemerintah Daerah dan Pusat hendaknya meningkatkan jumlah anggaran pendidikan agar mampu meningkatkan nilai Indeks pembangunan Manusia. Tidak signifikannya variabel anggaran bidang pendidikan harus dievaluasi baik dari sisi jumlah anggaran maupun realisasi anggarannya.

4. Rasio ketergantungan daerah harus diturunkan agar nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus naik. Menurunkan rasio ketergantungan daerah dapat dilakukan dengan cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan/atau menurunkan jumlah dana transfer pemerintah daerah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Rinda Ayun dan Luthfi Muta'ali (), "Pola Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2011", *Jurnal Bumi Indonesia*, Volume 2, Nomor 3.
- Arsyad, Licolin (2004), "Ekonomi Pembangunan (Edisi Keempat)", UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Badrudin, Rudy dan Mufidhatul Khasanah (2011), "Pengaruh Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", *Buletin Ekonomi*, Volume 9, Nomor 1, 1-82.
- Basuki, Agus Tri dan Nano Prawoto (2016), "Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS dan Eviews", PT Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Bhakti, Nadia Ayu; Istiqomah; dan Suprpto (2014), "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 2008-2012", *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vololume 18, No. 4, 452-469.
- Bisma, I Dewa Gde dan Hery Susanto (2010), *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007*, *Ganec Swara Edisi Khusus*, Volume 4, Nomor 3.
- Gujarati, Damodar N. dan Dawn C. Porter (2015), "Dasar-Dasar Ekonometrika (Edisi 5 - Buku 2)", Salemba Empat, Jakarta.
- Harahap, Riva Ubar (2011), "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kab./Kota Propinsi Sumatera Utara", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Volum 11, Nomor 1.



- Manik, Tumpal (2013), “Analisis Pengaruh Kemakmuran, Ukuran Pemerintah Daerah, Inflasi, *Intergovernmental* Revenue, dan Kemiskinan Terhadap Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi”, *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Volume 9, Nomor 2, 107-124.
- Manurung, Jonni J.; Alder Haymans Manurung; dan Ferdinand Dehoutman Saragih (2005), “*Ekonometrika: Teori dan Aplikasi*”, PT Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Ndakularak, Erwin; Nyoman Djinar Setiawina; dan I Ketut Djayastra (2014), “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali”, *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, Volume 03, Nomor 03.
- Santoso, Rokhedi Priyo (2012), “*Ekonomi Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan*”, UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Setiawan, Muhammad Bhakti dan Abdul Hakim (2013), “*Indeks Pembangunan Manusia Indoensia*”, *Jurnal Economia*, Volume 9, Nomor 1.
- Sriyana, Jaka (2014), “*Metode Regresi Data Panel*”, Ekonisia, Yogyakarta.
- Wardana, Dedy Pudja (2016), “*Pengaruh Pembangunan Ekonomi Terhadap Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur*”, *INOVASI: Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen*, Volume 12, Nomor 2.
- Widarjono, Agus (2013), “*Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews (Edisi Keempat)*”, UPP STIM YKPN: Yogyakarta.

**LAMPIRAN I**  
**DATA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA**  
**TAHUN 2008-2013**

No.	Provinsi	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Aceh	70.76	71.31	71.7	72.16	72.51	73.05
2	Sumatera Utara	73.29	73.8	74.19	74.65	75.13	75.55
3	Sumatera Barat	72.96	73.44	73.78	74.28	74.7	75.01
4	Riau	75.09	75.6	76.07	76.53	76.9	77.25
5	Jambi	71.99	72.45	72.74	73.3	73.78	74.35
6	Sumatera Selatan	72.05	72.61	72.95	73.42	73.99	74.36
7	Bengkulu	72.14	72.55	72.92	73.4	73.93	74.41
8	Lampung	70.3	70.93	71.42	71.94	72.45	72.87
9	Bangka Belitung	72.19	72.55	72.86	73.37	73.78	74.29
10	Kepulauan Riau	74.18	74.54	75.07	75.78	76.2	76.56
11	DKI Jakarta	77.03	77.36	77.6	77.97	78.33	78.59
12	Jawa Barat	71.12	71.64	72.29	72.73	73.11	73.58
13	Jawa Tengah	71.6	72.1	72.49	72.94	73.36	74.05
14	DIY	74.88	75.23	75.77	76.32	76.75	77.37
15	Jawa Timur	70.38	71.06	71.62	72.18	72.83	73.54
16	Banten	69.7	70.06	70.48	70.95	71.49	71.9
17	Bali	70.98	71.52	72.28	72.84	73.49	74.11
18	NTB	64.12	64.66	65.2	66.23	66.89	67.73
19	NTT	66.15	66.6	67.26	67.75	68.28	68.77
20	Kalimantan Barat	68.17	68.79	69.15	69.66	70.31	70.93
21	Kalimantan Tengah	73.88	74.36	74.64	75.06	75.46	75.68
22	Kalimantan Selatan	68.72	69.3	69.92	70.44	71.08	71.74
23	Kalimantan Timur	74.52	75.11	75.56	76.22	76.71	77.33
24	Sulawesi Utara	75.16	75.68	76.09	76.54	76.95	77.36
25	Sulawesi Tengah	70.09	70.7	71.14	71.62	72.14	72.54
26	Sulawesi Selatan	70.22	70.94	71.62	72.14	72.7	73.28
27	Sulawesi Tenggara	69	69.52	70	70.55	71.05	71.73
28	Gorontalo	69.29	69.79	70.28	70.82	71.31	71.77

29	Sulawesi Barat	68.55	69.18	69.64	70.11	70.73	71.41
30	Maluku	70.38	70.96	71.42	71.87	72.42	72.7
31	Maluku Utara	68.18	68.63	69.03	69.47	69.98	70.63
32	Papua Barat	67.95	68.58	69.15	69.65	70.22	70.62
33	Papua	64	64.53	64.94	65.36	65.86	66.25

*Sumber: BPS*



**LAMPIRAN II**  
**DATA RATA-RATA PENDAPATAN PENDUDUK PER KAPITA SEBULAN**  
**TAHUN 2008-2013 (dalam rupiah)**

No.	Provinsi	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Aceh	382076	427488	482705	554055	584100	627381
2	Sumatera Utara	391767	432389	499693	564565	599060	656133
3	Sumatera Barat	402002	456123	531874	640348	681391	757809
4	Riau	520258	575064	598012	754634	836550	879801
5	Jambi	381042	397618	476495	586786	623378	682409
6	Sumatera Selatan	361314	392374	453722	519312	598062	643332
7	Bengkulu	363602	377419	477749	532692	565559	654451
8	Lampung	334055	350855	411603	490180	517710	573634
9	Bangka Belitung	521091	570535	661834	736645	818697	939726
10	Kepulauan Riau	560188	608110	681998	904790	997793	1100265
11	DKI Jakarta	863667	938383	1024214	1355688	1403098	1528429
12	Jawa Barat	396929	444186	487681	608708	651026	726828
13	Jawa Tengah	306254	337381	393831	463907	502220	559713
14	DIY	416912	465011	553967	625043	700296	777409
15	Jawa Timur	331954	369077	411477	486426	498094	571752
16	Banten	454453	518970	644138	693987	719447	799876
17	Bali	429018	491271	623247	785622	885942	1008900
18	NTB	300443	336889	424377	444630	484661	547748
19	NTT	237323	279156	333008	384025	397111	432053
20	Kalimantan Barat	349180	395896	471360	586732	613273	672211

21	Kalimantan Tengah	418161	448259	511818	642867	699727	784864
22	Kalimantan Selatan	443508	498190	590378	699417	751833	813926
23	Kalimantan Timur	585302	693101	793438	894044	949152	1065917
24	Sulawesi Utara	341496	385041	506633	617669	686099	755755
25	Sulawesi Tengah	319637	373662	451174	539076	584341	648554
26	Sulawesi Selatan	321043	364835	461810	506323	553324	599462
27	Sulawesi Tenggara	274619	327344	425599	480285	531498	566489
28	Gorontalo	275924	302046	416691	516247	542220	580271
29	Sulawesi Barat	286585	311717	404379	381790	416912	476458
30	Maluku	305380	328009	388663	564711	597163	649515
31	Maluku Utara	409363	467349	526951	529906	562421	608016
32	Papua Barat	346929	444426	498338	750381	700639	806825
33	Papua	392173	430042	498350	556491	602751	675911

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

**LAMPIRAN III**  
**DATA PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI BIDANG KESEHATAN**  
**TAHUN 2008-2013 (dalam juta rupiah)**

No.	Provinsi	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Aceh	508335.6	591294.5	710432.8	832839.4	895106.3	886579.5
2	Sumatera Utara	152217.4	183126.9	205169.1	153438.3	263492.0	297944.1
3	Sumatera Barat	159801.4	198498.8	206926.0	249562.8	312823.5	354437.0
4	Riau	264842.5	253582.0	272150.3	113682.8	418375.9	540023.8
5	Jambi	113179.2	120643.7	140976.3	155231.0	188792.6	252247.9
6	Sumatera Selatan	132007.4	405898.1	420048.8	335210.4	266016.3	176955.1
7	Bengkulu	121087.2	131283.2	144555.1	156051.0	194107.9	219205.5
8	Lampung	151979.2	143387.4	171218.1	277543.6	330625.6	391228.5
9	Bangka Belitung	36906.0	97931.2	129458.8	177628.1	62167.0	86154.1
10	Kepulauan Riau	59311.7	84388.9	130314.5	132232.5	89850.6	125660.7
11	DKI Jakarta	1363013.5	1458805.4	2118768.5	2565538.9	3344062.0	4634050.5
12	Jawa Barat	107871.2	246717.3	288786.0	487761.3	532645.8	443863.6
13	Jawa Tengah	599049.4	687658.3	740700.9	752825.0	973037.7	1248835.7
14	DIY	49232.7	53286.6	53381.7	61995.9	127525.4	169183.7
15	Jawa Timur	707389.9	837158.1	1237179.0	1737417.1	1838068.1	2070310.3
16	Banten	121431.2	188873.6	203800.2	229235.0	228645.0	382841.8
17	Bali	69656.8	106975.5	96452.2	137846.9	449107.4	677394.1
18	NTB	111301.9	138369.9	150018.1	209391.0	196944.8	227398.2
19	NTT	92574.4	109121.5	132009.5	146229.3	165695.2	177059.8
20	Kalimantan Barat	133141.0	157916.8	184426.3	227837.4	231217.9	298337.1

21	Kalimantan Tengah	89302.1	104529.2	101138.1	143269.2	151268.1	189191.3
22	Kalimantan Selatan	191018.9	203629.8	241106.2	384550.5	485830.0	689023.7
23	Kalimantan Timur	534282.9	609643.0	656708.9	683429.8	808380.2	1155523.5
24	Sulawesi Utara	48211.6	56377.0	61959.5	74377.8	96125.5	122588.6
25	Sulawesi Tengah	78076.8	104334.4	110722.8	142971.8	166022.1	179235.3
26	Sulawesi Selatan	155534.2	184061.3	196991.0	253895.6	329489.0	340656.2
27	Sulawesi Tenggara	64067.0	79499.6	94685.6	276339.3	136642.7	135946.1
28	Gorontalo	11864.4	13580.5	22502.2	27327.6	30156.2	54611.9
29	Sulawesi Barat	12100.2	18384.3	38679.3	31122.6	39970.5	50404.1
30	Maluku	55959.8	68735.0	87061.1	115912.9	117980.4	159330.7
31	Maluku Utara	36049.5	59818.0	61120.8	55163.1	70851.3	94442.4
32	Papua Barat	272823.7	106335.2	91773.4	83416.1	87962.3	82906.5
33	Papua	40919.0	295294.3	444139.2	474867.8	575940.6	672966.0

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

**LAMPIRAN IV**  
**DATA PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN TAHUN**  
**2008-2013 (dalam juta rupiah)**

No.	Provinsi	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Aceh	1121958.2	1434703.9	1000552.0	1030263.8	1007302.2	738233.6
2	Sumatera Utara	131876.9	206203.5	286539.4	396536.0	412184.3	272543.5
3	Sumatera Barat	153238.5	170885.6	223829.7	130239.7	124173.8	151520.3
4	Riau	654749.7	835930.5	820141.2	58133.7	803249.6	743331.2
5	Jambi	196162.5	215972.7	207437.6	168837.2	236306.9	233974.3
6	Sumatera Selatan	244562.7	460668.7	593359.5	298218.4	281096.4	337021.2
7	Bengkulu	70641.8	78991.5	83326.7	82986.4	136360.6	159048.8
8	Lampung	69334.0	284700.2	250633.7	213459.3	298806.2	338545.5
9	Bangka Belitung	37308.6	32058.7	76716.9	28236.0	43271.0	69946.7
10	Kepulauan Riau	254241.1	225806.7	205345.8	243248.2	265251.7	375530.8
11	DKI Jakarta	2568886.0	2824724.3	6424169.2	8115163.2	10120365.6	12815350.5
12	Jawa Barat	261768.7	687180.9	939202.1	684529.3	735730.9	831949.5
13	Jawa Tengah	227590.2	232153.0	306813.1	307026.5	301254.2	318510.8
14	DIY	95776.9	153334.4	156961.8	254362.7	273588.3	251362.4
15	Jawa Timur	238702.7	291259.5	253435.3	384641.5	448573.1	514845.6
16	Banten	104747.5	146923.6	186418.5	216153.7	250023.6	301333.1
17	Bali	62155.9	113199.4	183425.0	219402.1	219904.0	237859.1
18	NTB	33937.8	33378.2	35282.5	39136.9	43995.7	45331.7
19	NTT	62167.8	64953.6	83329.7	95201.9	91083.8	87184.5
20	Kalimantan Barat	75485.1	108514.0	90828.4	93055.0	87581.7	128644.6
21	Kalimantan Tengah	110493.8	248209.7	320041.6	242010.6	219000.3	215132.7
22	Kalimantan Selatan	122751.9	212441.4	238200.4	373658.1	190178.6	389798.7
23	Kalimantan Timur	512451.7	428948.3	388208.0	360197.3	389328.8	804208.2



24	Sulawesi Utara	60703.7	96268.1	80206.6	121614.8	123834.5	115954.4
25	Sulawesi Tengah	67916.2	90856.3	82934.7	91968.6	105714.5	135804.2
26	Sulawesi Selatan	80849.6	87930.6	92845.2	105652.5	129691.5	119067.0
27	Sulawesi Tenggara	45815.1	132206.2	132387.5	56641.5	89607.2	87481.2
28	Gorontalo	50393.2	65918.7	51914.2	76189.3	108190.1	117485.1
29	Sulawesi Barat	17805.4	32816.8	34985.7	39415.2	51253.4	48824.5
30	Maluku	116735.8	106140.2	137965.4	144827.3	104266.2	92018.0
31	Maluku Utara	21635.2	30688.3	39062.8	19507.6	32921.2	44536.9
32	Papua Barat	156098.0	177806.7	121198.8	132808.5	138465.9	135261.9
33	Papua	33181.4	239858.3	271537.0	263012.6	300659.1	218340.9

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan



## LAMPIRAN V

## DATA RASIO KETERGANTUNGAN DAERAH TAHUN 2008-2013

(dalam persen)

No.	Provinsi	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Aceh	33.89	32.80	24.85	24.64	22.63	25.03
2	Sumatera Utara	35.06	34.41	34.22	28.37	23.00	23.66
3	Sumatera Barat	56.40	51.62	46.49	45.03	36.14	40.43
4	Riau	68.54	65.16	56.19	62.75	54.65	53.62
5	Jambi	62.83	61.79	61.39	59.17	58.79	53.14
6	Sumatera Selatan	60.66	55.96	50.31	54.14	44.64	45.85
7	Bengkulu	68.19	57.89	54.79	60.61	55.40	57.69
8	Lampung	52.55	51.59	49.49	45.69	42.43	32.23
9	Bangka Belitung	70.85	68.57	69.81	62.08	56.70	60.57
10	Kepulauan Riau	55.86	68.07	71.87	71.34	63.91	64.98
11	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	44.59	46.14	46.48	34.16	29.73	22.27
12	Jawa Barat	28.63	25.36	27.14	24.88	15.29	15.51
13	Jawa Tengah	30.55	30.41	31.89	28.77	19.67	20.29
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	53.86	50.62	49.58	50.34	43.94	42.03
15	Jawa Timur	32.09	31.42	29.93	22.88	20.91	17.38
16	Banten	32.46	31.11	32.23	28.77	23.48	19.04
17	Bali	43.21	39.51	34.78	32.94	26.22	26.01
18	Nusa Tenggara Barat	66.20	62.01	59.64	54.88	46.67	47.64
19	Nusa Tenggara Timur	76.53	76.55	75.46	71.47	49.97	50.84
20	Kalimantan Barat	65.75	62.30	58.62	57.56	42.56	41.87
21	Kalimantan Tengah	71.66	67.15	56.74	59.96	53.28	55.00
22	Kalimantan Selatan	49.70	46.14	44.89	41.35	35.02	29.07
23	Kalimantan Timur	68.12	62.69	63.76	58.89	48.26	51.86
24	Sulawesi Utara	71.80	65.03	62.49	55.89	51.77	52.72
25	Sulawesi Tengah	74.61	69.73	71.18	71.84	55.55	54.14
26	Sulawesi Selatan	44.85	41.09	39.97	37.96	28.77	29.02
27	Sulawesi Tenggara	75.18	57.58	63.32	65.47	54.74	59.21
28	Gorontalo	87.12	85.60	80.66	80.72	68.99	69.88
29	Sulawesi Barat	85.33	84.28	77.88	73.97	69.64	70.61
30	Maluku	83.54	79.24	75.18	74.04	67.27	66.92

31	Maluku Utara	90.57	84.80	87.30	88.55	72.94	72.14
32	Papua Barat	96.15	38.10	33.48	39.36	29.54	39.99
33	Papua	35.10	29.44	28.71	29.24	43.41	30.58

*Sumber: data yang telah diolah dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan*



## LAMPIRAN VI

### HASIL REGRESI DATA PANEL: *COMMON EFFECT MODELS*

Dependent Variable: Y?				
Method: Pooled Least Squares				
Sample: 2008 2013				
Included observations: 6				
Cross-sections included: 33				
Total pool (balanced) observations: 198				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-9.662247	7.455581	-1.295975	0.1965
LOG(X1?)	4.479060	0.538283	8.321013	0.0000
LOG(X2?)	-0.768362	0.252072	-3.048189	0.0026
LOG(X3?)	1.598536	0.225574	7.086536	0.0000
X4?	0.025731	0.011196	2.298170	0.0226
R-squared	0.512080	Mean dependent var		72.12500
Adjusted R-squared	0.501967	S.D. dependent var		3.038213
S.E. of regression	2.144111	Akaike info criterion		4.388255
Sum squared resid	887.2616	Schwarz criterion		4.471292
Log likelihood	-429.4372	Hannan-Quinn criter.		4.421866
F-statistic	50.63906	Durbin-Watson stat		0.115569
Prob(F-statistic)	0.000000			

## LAMPIRAN VII

### HASIL REGRSI DATA PANEL: *RANDOM EFFECT MODELS*

Dependent Variable: Y?				
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)				
Sample: 2008 2013				
Included observations: 6				
Cross-sections included: 33				
Total pool (balanced) observations: 198				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	26.46536	2.060857	12.84192	0.0000
LOG(X1?)	3.005044	0.154000	19.51322	0.0000
LOG(X2?)	0.221234	0.073438	3.012526	0.0029
LOG(X3?)	0.038152	0.065583	0.581733	0.5614
X4?	-0.013294	0.003718	-3.575830	0.0004
Random Effects (Cross)				
_ACH--C	-0.727228		_LAM--C	-0.019460
_BABEL--C	0.640647		_MAL--C	0.453518
_BAL--C	-0.513498		_MALUT--C	-1.965111
_BAN--C	-2.200952		_NTB--C	-5.416647
_BENG--C	1.534067		_NTT--C	-2.971055
_DIY--C	3.831701		_PABAR--C	-2.886449
_DKI--C	2.454979		_PAP--C	-7.235703
_GOR--C	-0.033903		_RIA--C	3.348366
_JABAR--C	-0.304889		_SUBAR--C	1.596134
_JAM--C	1.224084		_SULBAR--C	-0.319097
_JATENG--C	0.683831		_SULRA--C	-0.833016
_JATIM--C	-0.400968		_SULSEL--C	-0.076626
_KALBAR--C	-2.387114		_SULTENG--C	-0.088574
_KALSEL--C	-2.648849		_SULUT--C	4.530067
_KALTENG--C	2.710995		_SUMSEL--C	1.282098
_KALTIM--C	2.258590		_SUMUT--C	2.072049
_KEPRI--C	2.408012			
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			2.210885	0.9857
Idiosyncratic random			0.265895	0.0143
Weighted Statistics				
R-squared	0.904872	Mean dependent var	3.536970	
Adjusted R-squared	0.902901	S.D. dependent var	0.876410	
S.E. of regression	0.273096	Sum squared resid	14.39424	

F-statistic	458.9624	Durbin-Watson stat	0.890656
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.309943	Mean dependent var	72.12500
Sum squared resid	1254.838	Durbin-Watson stat	0.010217

